

UPAYA KPU KABUPATEN NIAS
UTARA MENCEGAH KEKERASAN
SIMBOLIK PADA
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2019

by Zega Ananda

Submission date: 31-Oct-2023 11:12PM (UTC-0400)

Submission ID: 2213808627

File name: ANANDA_ZEGA_4.docx (2M)

Word count: 17017

Character count: 111710

**UPAYA KPU KABUPATEN NIAS UTARA MENCEGAH KEKERASAN
SIMBOLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2019**

SKRIPSI



**Oleh
ANANDA ZEGA
NIM 192119006**

14

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NIAS
OKTOBER 2023**

**UPAYA KPU KABUPATEN NIAS UTARA MENCEGAH KEKERASAN
SIMBOLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2019**

10
SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Program Sarjana Pendidikan

Oleh

ANANDA ZEGA

NIM 192119006

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NIAS

OKTOBER 2023

ABSTRAK

Zega, Ananda, 2023. Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Skripsi. Pembimbing Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan simbolik yang ada dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dari beberapa hal yang berkaitan di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019, Mengapa kekerasan simbolik dalam pelaksanaannya dapat terjadi di Kabupaten Nias Utara dari Tahun 2019, dan apakah ada cara yang bisa digunakan KPU Nias Utara untuk mencegah kekerasan simbolik apa sudah terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Nias Utara Tahun 2019.

Penelitian yang biasa digunakan yaitu suatu pendekatan deskriptif dengan sesuai metode kualitatif. “Ketika dari beberapa pendekatan deskriptif agar bisa mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan fakta, maka harus berpedoman pada data yang didapatkan dilapangan langsung oleh peneliti. serta mencatat setiap fakta secara holistik dapat diolah datanya atau masalah yang dicari pemecahannya”. Analisis dari peneliti itu sendiri perlu adanya kesesuaian dari suatu masalah yang sudah dapat diteliti sehingga ketika melakukan dengan *alat komunikasi* sebagai alat dalam merekam sebagian pembicaraan dari telitiannya maka, hasil gambaran bisa sebagai bukti nyata, dan bahan pertimbangan yang bisa didapatkan untuk menuliskan setiap percakapan dengan bahan, data atau informasi. Kemudian pastikan dalam data yang diperlukan harus langsung didapatkan atau datang dilapangan penelitian untuk diteliti, menanyakan pertanyaan dan dokumentasi bukti tepat. Agar setiap yang diteliti dari bahan bagian pembahasan bisa disimpulkan adalah: *Pertama*, kekerasan simbolik yang sudah ada dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2019 yaitu seperti isu money politik, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah dan mengejantawahkan PNS serta honorer berada dalam posisi dilematis. *Kedua* kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi karena, faktor ketidaktahuan/tidak menyadari kekerasan simbolik itu sudah terjadi pada diri masyarakat itu sendiri, faktor menginginkan posisi jabatan yang aman khususnya bagi para PNS dan honorer serta menginginkan keuntungan semata demi diri sendiri atau pribadi seperti menerima uang politik/money politik dan faktor hoaks di media sosial/internet tentang pasangan calon. *Ketiga* bagaimana upaya KPU dalam mengatasi kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu dengan adanya paham yang diberikan kepada rakyat khususnya yang tidak mengerti apa itu pendidikan politik, maka, perlu melakukan sesuatu hal yang dapat menunjang bagi rakyat biasa tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

Kata Kunci : KPU, Kekerasan Simbolik, Pilkada

5 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti bisa dengan mudah menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019”** dengan baik. Skripsi yang dimaksudkan agar dapat memenuhi satu kewajiban yang harus dilakukan ketika saatnya memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dengan, penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti selalu mendapatkan motivasi, perhatian, serta semangat yang sangat berharga berupa petunjuk, motivasi, arahan dan bimbingan serta saran-saran yang membangun untuk beberapa pihak tertentu, sehingga izinkan saya, untuk mengucapkan terimakasih banyak hal terkhusus kepada:

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si sebagai Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Bapak Dr. Yaredi Waruwu, S.S., M.S sebagai Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
3. Bapak Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H sebagai Plt. Ketua Program Studi PPKn yang telah mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Bapak Berkat Persada Lase, S.Pd., M.Pd sebagai Plt. Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah membantu mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat dan sesuai juga dengan arahan yang diberikan.
5. Bapak Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A. sebagai pendukung penuh sudah membimbing dengan tepat, mengarahkan, serta memfasilitasi peneliti sehingga penyelesaiannya pun ketika disituasi sulit sekali pun dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Bapak/ibu Dosen yang berada dilingkungan Universitas Nias terkhusus juga untuk Program Studi Pendidikan Pancasila yang sudah sangat membantu dalam pengajaran yang baik selama peneliti menjalani perkuliahan.

7. Bapak Evorianus Harefa, S.E selaku ketua KPU yang sudah meluangkan waktunya dan telah bersedia memberikan kesempatan dalam membantu peneliti untuk diwawancara untuk mendapatkan informasi penelitian.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta Bapak Faoma'aro Zega dan Ibu Mesiria Zega (A/I. Paris Zega), saudara/saudari yang selalu menyemangati, mendukung, mengarahkan, untuk itu diperlukan sekali penyemangat yang dapat menunjang keberhasilan dan penyelesaian skripsi tepat pada waktunya.
9. Saudara serta teman angkatan 2019 Prodi PPKn yang selalu memberikan semangat, dan mendorong untuk menyelesaikan studi, dan secara insentif memberikan masukan yang berharga sejak masalah penelitian ini dibentangkan dalam pertemuan kelas hingga sekarang.

Dengan ini, peneliti banyak sekali mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, yang sudah mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi ini, serta begitu juga dengan rasa syukur tertentu bagi yang sudah mendukung sehingga biarlah Tuhan yang maha kuasa yang dapat membalaskan kepada Bapak/Ibu dan saudara/i semua, *Ya'ahowu*.

Gunungsitoli, Oktober 2023
Peneliti,

Ananda Zega
NIM. 192119006

HALAMAN SAMPUL**BAGIAN JUDUL**

HALAMAN UNTUK PERSETUJUAN TETAP	i
LEMBAR DARI PENGESAHANNYA	ii
PERNYATAAN SESUAI DARI KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kekerasan Simbolik.....	10
2.1.1 Pengertian Kekerasan	10
2.1.2 Pengertian Kekerasan Simbolik.....	11
2.1.3 Jenis-jenis Kekerasan Simbolik.....	12
2.2 Politik Lokal	13
2.2.1 Pengertian Politik Daerah Lokal.....	13
2.3 Ranah Politik Sesuai (Pilkada).....	15
2.3.1 Pengertian Pilkada	15
2.3.2 Tujuan Pemilihan Kepala Daerah	19

2.3.3	Makna Pilkada	20
2.3.4	Manfaat Pentingnya (Pilkada)	78
2.4	Bagian Penelitian Yang Sangat Relevan	22
2.5	Alur Teliti Yang Sudah Dibuat	23
8	BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1	Pendekatan dan Bagian Telitiannya	25
3.2	Variabel Menelitian	26
3.3	Lokasi serta Jadwal Penelitian.....	26
3.4	Sumber bahan datanya.....	27
3.5	Bagian Dari Istrumen Teliti	28
3.6	Sesuai Pengumpulan Data	29
3.7	Nelitian Sesuai Analisis Datanya	31
4	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1	Paparan Dari Data.....	33
4.2	Temuan Penelitian	36
4.3	Pembahasan	44
	BAB V KESIMPULAN SERTA SARAN	45
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran	67
	BAGIAN TERAKHIR	68
	LAMPIRANNYA	70

DAFTAR TEBELNYA

<i>Tebelnya</i>	<i>Halaman</i>
1. Keadaan Pegawai dan Honorer KPU Kabupaten Nias Utara	34
2. Jadwal Penelitian.....	27

DAFTAR GAMBARANNYA

<i>Gambaranya</i>	<i>Halaman</i>
1. Bagiannya Alur Telitian	23
2. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3. Analisis Data Interatif dan Huberman	13

DAFTAR LAMPIRANNYA

<i>Lampirannya</i>	<i>Penomoran</i>
1. Daftaran Tanda Tanyaan Untuk Ketua KPU Kabupaten Nias Utara.....	59
2. Pedoman Wawancara Untuk Ibu Kasubbang KPU Kabupaten Nias Utara	60
3. Pedoman Wawancara Untuk Staf KPU Kabupaten Nias Utara	61
4. Pedoman Wawancara Untuk masyarakat Kabupaten Nias Utara	62
5. Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Nias Utara.....	63
6. Hasil Wawancara dengan Ibu Kasubbang Umum KPU Kabupaten Nias Utara	66
7. Hasil Wawancara dengan Staf KPU Kabupaten Nias Utara	70
8. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Nias Utara.....	73
9. Informan Penelitian	77
10. Personalia Penelitian	78
11. Pendukung Bahan yang di Dapat dari Telitian	70

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara etimologis, kata politikan dapat dikatakan mengadopsi beberapa kata dari bagian tertentu seperti ‘*Polis*’ yang bisa diartikan kota atau Negara dan rakyat. Kemudian dapat juga, dibedakan menjadi beragam kalimat atau kata dan defenisi, ibaratnya kata yang bisa di artikan “rakyat atau bagian Negara”, “Politikos artinya warga masyarakat atau rakyat yang, berada pada suatu wilayah tertentu”, yang artinya sebagai pelengkap tetap, dalam suatu Negara serta sebagai suatu organisasi yang dapat mengambil sebuah keputusan tertentu.

Dari pandangan para ahli tentang politik, menurut Budiardjo (1982:8), adalah:

Politik memiliki beragam aktivitas yang bisa dilakukan dengan paham sesuatu hal tentang politikan serta berhubungan dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam masalah yang dialami oleh suatu Negara. Menurut pandangan Ramlan politik ialah korelasi pembentukan dari rakyatnya dengan pemerintahnya sehingga membentuk sebuah komunikasi antara Pemerintah dengan rakyat yang saling mendukung dengan menjalin relasi yang baik dari kedua belah pihak sehingga pengambilan keputusan dalam politik tersebut berjalan dengan lancar.

Ketika bidang politik mencakup banyak hal, mulai dari merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan segala kegiatan, mengamati serta menganalisa segala pelaksanaan kegiatan dibidang, sistem dan implementasinya. Bidang politik juga termasuk dalam melaksanakan sesuatu hal, diperlukan ketaatan dalam bidang apapun itu, sehingga dengan, adanya hal seperti itu juga Pilkada dapat berjalan lancar. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pintu yang membuka ruang demokrasi di Indonesia (Feralys, 2015:46).

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan sesuai aturan dengan beberapa hal yang sudah dibentuk dari:

Dalam hal memilih merupakan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan serentak pertama, yang menggabungkan pemilihan dari beberapa anggota legislatif yang di pilih langsung oleh rakyat, dengan menggunakan hak untuk ikut turut serta dalam memberikan partisipasinya untuk mencoplos siapa saja pilihan yang akan mereka pilih sebagai calon pemimpin kedepan sesuai dengan aturan yang diberlakukan

sehingga masyarakat juga nyaman dan memiliki pemerintah yang sangat memahami untuk rakyat.

Politik ialah semua hal yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan dalam bidang organisasi, atau pemerintahan dari suatu negara. Kemudian juga, dapat dimaknai sebagai salah satu bagian yang dapat menunjang konsistensi dari ketajaman dalam memberikan keputusan dalam bidang apapun (Tomasan, 2016:15).

Dengan demikian, politik bisa disimpulkan bahwa suatu cara atau proses yang dilakukan seseorang dari beberapa bagian tertentu dalam pengambilan keputusan secara tepat kedalam suatu negara demi tujuan bersama (Surbakti, 1992:1-8).

Kekerasan juga seringkali digunakan ketika banyak saudara kita yang ketika dingertak atau dibully karena mereka rakyat biasa, akan mengalami beberapa gangguan terhadap apa yang sudah dilakukan, untuk itu hal tersebut bisa memberikan tekanan yang cukup mendalam jika dinilai sangat tidak layak. Artinya, dengan adanya hal seperti itu secara terus menerus didalam berbagai situasi maka akan berdampak pada diri masyarakat. Keterkaitan pengaruhnya cukup besar pada rakyat dikarena hampir keseluruhan diberbagai bidang pasti akan mengalami kelemahan dan bisa saja masyarakat tersebut tidak akan percaya diri lagi dengan apa yang dilakukannya itu. "Maka dari situlah diperlukan beberapa hal yang bisa digunakan dalam mengatasi kekerasan itu termasuk juga dengan simbolik ini, yang cukup menyita perhatian beberapa orang karena kekerasannya bersifat abstrak atau tidak terlihat secara langsung tetapi melalui bahasa atau kata dan kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Ketika kekerasan itu sudah dialami oleh masyarakat maka akan memiliki dampak yang begitu fatal, bahkan bisa dengan penyembunyian kekerasan yang bersifat dekade proses lama (Martono, 2012:1-2)".

Kekerasan simbolik sebenarnya tidak hanya berada dalam keluarga saja akan tetapi, berkembang juga sesuai dengan berbagai macam tindakan dari diri seseorang, ketika sebagian besar masyarakat berbuat dan melakukan kekerasan tersebut kepada orang lain, maka akan berdampak buruk dan bisa saja kepercayaan dirinya pun tidak ada lagi atau putus asa (Reza, 2012:19).

Bagian dari lingkupan kekerasan dapat didefinisikan berikut:

Pertama, dianggap sebagai suatu tindakan atau kekerasan yang sudah sangat melanggar aturan tertentu. Kedua, jika kekerasan itu dilakukan kepada orang lain dengan sengaja atau tanpa disengaja pastikan mengalami dampak. Ketiga, biasanya ketika sudah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kekerasan yang buat seseorang maka akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan simbolik merupakan ¹⁷ suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh orang lain yang bersifat abstrak dan tidak terlihat oleh orang lain secara langsung maupun tidak bisa dirasakan oleh fisik. Namun akan berdampak jika terjadi pada diri masyarakat secara proses lama (Pramesti 2017:625).

Kekerasan juga merupakan suatu serangkaian tindakan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong melukai orang lain tanpa sadar, kekerasan emosional atau psikologi seperti ancaman, mempermalukan orang lain, berbicara buruk kepada orang lain dan lain sebagainya (Santoso, 2002:38).

Kekerasan bisa dikatakan salah satu hal yang bersifat keras dan sangat berakibat fatal, terhadap orang yang sudah melakukannya kepada masyarakat lain. Baik itu dalam bentuk cedera, ataupun memberikan luka ringan terhadap mereka dan akan mengakibatkan dampak (Ainun, 2012:2).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebagian besar kekerasan itu biasanya kerap banyak terjadi dikalangan anak remaja, maupun orang dewasa. Akan tetapi dibalik itu semua dapat terjadi pula juga dengan adanya berbagai macam penafsiran dan tingkah laku pada saat berada dilingkungan yang buruk, atau bisa bilang kurang baik bagi masyarakat. Itu semua dapat ditinggalkan sesuai dengan kondisinya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat untuk itu diperlukan penanganan yang cukup serius dari berbagai pihak agar diperhatikan dengan sebaik mungkin, dan diberikan alternatif solusi yang tepat (Soerjono, 2010:3).

Jadi, kekerasan memiliki makna yaitu suatu tindakan yang menyakiti secara psikis, fisik, dan sosial. Masyarakat dengan tindakan yang dilakukan tersebut, seperti memukul, menendang tubuh korbannya (Matlin, 2008:9).

Jika berbalik keulasan sebelumnya, bahwa telah dibahas mengenai kekerasan simbolik dengan beberapa pernyataan yang diperjelas oleh peneliti untuk bisa mengetahui apa saja bagian yang selalu terkait dengan kekerasan dan dijadikan sebagai bahan yang digunakan untuk menemukan sesungguhnya kenapa kekerasan itu dapat terjadi. Kalau perlu digunakan beberapa metode yang dapat membantu dalam melakukan penelitian. Mana tahu mungkin ada hubungannya penelitian ini memiliki hubungannya dengan penelitian yang lain sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian lain yang berkaitan dengan politik atau kekerasan simbolik (Darmidi, 2010:35-36).

Banyak sekali hal yang berhubungan dengan bagian kekerasan ini salah satunya yaitu, kerap banyak terjadi dalam ranah politikan maupun keluarga yang sangat berkembang diberbagai bidang tertentu. Akhirnya diperlukan pemecahan masalah yang sudah kian terlalu menyebar dikalangan masyarakat ketika kekerasan itu sudah sering diketahui oleh berbagai pihak yang berwenang maka dapat terselesaikan semua itu dengan baik (Hoetomo, 2012:4-5).

Dalam hal simbolik biasanya, dapat terjadi akibat ketidaktahuannya masyarakat dengan adanya kekerasan tersebut, bahkan dapat menyinggung perasaan tertentu karena wujud dari kekerasan simbolik ini ialah bentuk kata dan penghinaan atau bully yang biasa dilakukan kepada orang lain (Fashri, 2007:89).

Gagasan dari Maronta (2004:4), menyatakan:

Dalam kekerasan simbolik memang kalau dilihat dari segi politik sudah banyak sekali terjadi baik melalui kalimat ataupun kata dari berbagai sumber yang bidang seperti keluarga, sekolah, bahkan politik ini tentu dengan itu sangat di perlu sekali tindakan dalam menangani permasalahan tersebut dari berbagai hal positif untuk kemajuan jika perlu dicari solusi yang bisa digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Ketika memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi kekerasan simbolik ini, maka seharusnya tanpa melibatkan sesuatu yang dapat menyakiti korbannya tanpa disadari bisa untuk diberikan solusi langsung. Kemudian kekerasan tidak hanya berada dalam lingkungan yang buruk saja akan tetapi bisa juga dalam pendidikan bahkan keluarga juga pasti ada

kekerasan. Ketika sudah terjadi maka harus diperlukan bagaimana cara mengatasi kekerasan tersebut atau seperti apa solusi pemecahannya (Molan, 2019:345).

Melibatkan diri dalam masalah jika tidak ada pemecahan solusi yang cukup serius dalam menangani permasalahan tersebut dari berbagai macam hal maka akan mendapatkan konsekuensi tersendiri terhadap yang melakukannya. Bahkan pun bisa akan memiliki dampak yang tajam melalui perlakuan yang tidak baik tersebut oleh kekerasan yang dilakukan. Akan tetapi dengan keadaan tertentu bisa diperlukan sekali untuk pembukaan jalan solusi yang cukup sederhana, tapi berkaitan dengan pemecahan masalah kekerasan yang dapat digunakan karena jika seandainya tidak sesuai dengan pemecahan masalahnya maka, cukup berpengaruh kepada opsi solusi yang akan diberikan (Bourdieu, 2021:28).

Menurut statusnya simbolik tidak hanya ada dalam politikan saja akan tetapi bisa juga dengan diketahui dari beberapa penjelasan para ahli dengan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh beberapa segi menurut mereka dari apapun itu dan pada intinya selalu berkaitan dengan kekerasan simbolik. Walaupun masih banyak sekali kelemahan dari kelengkapannya dari segi teori para ahli tapi bisa diketahui perbedaannya (Bourdieu, 2021:5).

Memang jika dipergunakan dalam hal aturan yang tidak sesuai, pasti akan terbentuk kebiasaan dari tindakan melakukan kekerasan, yang sebenarnya tidaklah wajar untuk dilakukan karena mengintimidasi atau mengganggu orang lain. Sehingga hal demikian pun akan berakibat kepada siapapun yang sudah terkena kekerasan tersebut. Namun, pada kenyataanya tindakan seperti itu harus dihilangkan karena hal demikian akan menyakiti orang lain bahkan dapat merasakannya secara berkelanjutan lama untuk itu perlu ada perhatian serta pendekatan yang sesuai kualitas agar mendapatkan solusi yang bisa dipendominasi untuk pemecahan masalah kekerasan tersebut (Bourdieu, 2021:10).

Kekerasan simbolik juga dapat diartikan, sebagai suatu perubahan yang menonjol sangat mementingkan pemanfaatan dari berbagai segi dibidang tertentu. Kemudian sangat berdampak juga terhadap kepentingan

yang mendesak. Maka dengan hal itu kerap kali berhubungan dengan kekerasan simbolik, kelangsungan sebenarnya kalau dikaji tidak akan bisa dipahami pada diri orang lain jika kekerasan tersebut dilakukan oleh beberapa orang terhadap kasus simbolik yang sangat tidak mudah dilihat namun kekerasannya dapat dirasakan oleh orang lain yang terkena dari dampak simbolik ini untuk diperlukan sekali cara menangani kekerasan semacam ini jika tidak ingin berkembang lebih jauh lagi (Megan, 2018:23).

Jadi, bisa dikatakan bahwa simbolik itu dapat dimaknai dengan suatu praktik tindakan yang sangat mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaanya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kekerasan simbolik adalah suatu kekerasan yang lebih berpatokan kesebuah tindakan yang berkaitan dalam hal keras atau dalam arti lain kekerasan. Bahkan orang lain pun tidak bisa mengetahui dengan mudah kekerasan tersebut, dikarenakan sifatnya yang abstrak atau tidak mudah untuk dikenali. Begitu juga dengan berbagai macam kekerasan lain yang sifatnya berdampak harus diatasi dengan baik. Kekerasan simbolik ini juga tidak hanya ada didalam keluarga saja akan tetapi, terdapat dalam berbagai bidang salah satunya yaitu dalam berpolitikan (Martono, 2012:39).

Selanjutnya berdasarkan pengalaman, dan penglihatan langsung peneliti dilapangan pada saat melaksanakan penelitian yang sesuai dengan dilapangan pada (Pilkada) yakni Tahun 2019 dalam Nias Utara terdapat beberapa kekerasan simbolik diantaranya yaitu:

Pertama, pada pelaksanaannya pemilihan kepala daerah selalu dikaitkan dengan isu (money politik) salah satunya dengan memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Pada pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias utara sering dikaitkan dengan peristiwa politik uang. Setiap Calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya.

calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditunjukkan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Pengetahuan yang tidak menyeluruh ditengah masyarakat, peristiwa politik uang dianggap hal wajar dan cukup lazim, Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaan tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon pemimpin daerahnya secara bijak (Alamsyah, 2012:3).

Kedua, dalam pelaksanaan pasangan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara juga terdapat kabar atau berita hoaks tentang calon Kepala Daerah melalui media sosial. Misalnya, selalu dimasukan dengan pemenuhan dimana tidak lengkap. Walaupun tidak berbahaya namun selalu berkaitan dan dirasakan oleh beberapa pihak tertentu yang berwenang pada saat itu. beredar dimedia sosial seperti Fecebook. Namun setelah ditelusuri, ternyata hal itu hanya berita bohong tidak sesuai dengan informasi tidak benar atau hoaks, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Utara mengklarifikasi bahwa informasi tersebut ilegal atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setiap pasangan calon Kepala Daerah pasti melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masrayakat menurut cara tersendiri. Salah satu wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebarakan dimedia yang dapat dilihat oleh orang lain Facebook, dan akun yang ada berita. Salah satu suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, sebenarnya jika di cari tahu lebih dalam mengenai bantuan sosial itu sepertinya kurang sesuai bahkan salah sasaran realisasi bantuan sosial

tersebut. kemudian bagi masyarakat juga masih belum tersampaikan dengan jelas atau berita hoaks. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon. Pada akhirnya baik pasangan calon maupun masyarakat tanpa disadari telah mengalami kekerasan simbolik. Pasangan calon ditimpa kekerasan merasa dihianati oleh anggota kepercayaannya, sedangkan masyarakat tanpa menyadari telah mengalami kekerasan didustakan (Moleong, 2005:3).

Ketiga, mengejantawahkan pegawai selalu disasarankan kedalam posisi. yang sangat terpojok untuk keuntungan pribadi mereka, sehingga tanpa disadari itu sudah menjadikan bahaya bagi kalangan tertentu. Pada pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara, ditemukan juga kasus mengejantawahkan PNS dan honorer. Setiap pasangan calon Kepala Daerah merencanakan taktiknya untuk mencari dukungan dari pihak manapun termasuk mengaitkan para PNS maupun honorer baik dibidang pendidikan maupun dibidang perkantoran dan bidang lainnya. Pasangan calon Kepala Daerah dalam relasi sosialnya mengakui para PNS dan honorer dengan memberikan jaminan pekerjaan yang layak jika mereka dipihak pasangan calon tersebut. Sebuah keuntungan yang tidak disia-siakan oleh siapapun PNS dan honorer yang menerima peluang tersebut karena menghendaki posisi aman. Namun, pada celah tidak disadari bahwa keadaan yang menguntungkan tersebut kenyataan telah mengenai mereka sebuah kekerasan simbolik yaitu tidak memiliki hak bebas untuk menentukan pilihannya, dalam arti berada pada posisi dilematis dan dibawah tekanan, tidak memilih maka *nonjob* (Riawanti, 2022:39).

Berdasarkan hal diatas, sehingga diperlukan pencarian masalah agar bisa dipecahkan sesuai dengan **“Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik Pada Pelaksanaannya Didalam Pilkada Untuk Di Dalam 2019.”**

1.2. Fokus Penelitian

Sesuai dengan hal itu dibagian awal maka, harus berfokus pada penelitian ialah mengamati dan mengungkap permasalahan tentang **“Upaya**

KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.”

1.3. Rumusan Masalah

Agar mengetahui jalan penelitian yang sudah diteliti, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Seperti apakah kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
2. Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi?
3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dimana tujuan penelitian itu di tunjukan dalam suatu penelitian. Maka berpedoman pada fokus penelitian dari awal, adapun beberapa yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memahami seperti apakah kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini yaitu beberapa hal yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian:

1. **Secara Teoritis**

Agar memperkaya kelengkapan dan tambahan khususnya kekerasan simbolik dalam ranah politik lokal.

2. Secara Praktis

- a. Kelebihan dalam hal pemerintahan, dapat informasi kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada, sehingga pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasinya.
- b. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi dan gambaran tentang kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada.
- c. Bagi Peneliti, dapat menjadi sumber acuan untuk mengetahui kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada.

KAJIAN PEMBAHASAN**2.1. Kekerasan Simbolik****2.1.1. Pengertian Kekerasan**

Biasanya kekerasan yang ada dalam politik itu selalu berkaitan, dengan menjatuhkan pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan artinya sering sekali digunakan, dalam memperoleh keuntungan pribadi sendiri walaupun seperti demikian. Namun, ada juga yang menggambarkan bagaimana kekerasan itu bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat contohnya saja ketika membully teman hal itu sudah menjadi perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan maka untuk itu diperlukan solusi dalam menangani kekerasan tersebut supaya tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi kaum remaja dan orang dewasa (Robert, 2020:45).

Suatu kekerasan dalam bentuk tindakan yang memang menyakiti ²⁵hati orang lain dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka baik itu dalam segi menghina atau memberikan cedera maka itu akan menimbulkan kesenjangan yang dapat menyakiti hati sesama masyarakat.

Menurut Reza (2012:19), menyatakan bahwa:

Melakukan kekerasan fisik yang selanjutnya mereka sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi maka akan mengenai sasaran yang menyebabkan orang disekitar itu bisa saja akan terluka dengan apa kejadian yang dialami secara terus menerus dibidang tersebut.

Menurut Santoso (2017:30), bahwa pengertian Kekerasan juga mengatakan bahwa:

Sebagai bahan dalam mengetahui masalah kekerasan itu tidak lain berkaitan erat hubungannya dengan masalah masyarakat dan diharapkan dapat mengetahui sejauh mana solusi yang akan diberikan dalam menyelesaikan kekerasan tersebut dengan baik dan benar dalam jangka waktu singkat.

Memudahkan dalam mengatasi kekerasan betapa pentingnya menilai sejauh mana kesulitan yang dilihat dan dihadapi (Soekanto, 2002:98). Keterkaitannya masalah seperti ini telah banyak

ditemukan dari berbagai macam kekerasan salah satunya yaitu kekerasan simbolik dalam politik Pilkada, permasalahan seperti ini memang sebenarnya sangat dibutuhkan solusi tepat demi untuk menghambat terjadinya kekerasan secara terus menerus (Tekinon, 2013:10).

Jadi, bahwa setiap penguasaan dalam mengatasi kekerasan itu haruslah berawal dari diri sendiri dalam memperbaiki terlebih dahulu, baru kemudian seterusnya diberitahukan kepada orang lain untuk tidak memuat onar atau kesalahan yang bisa menimbulkan pihak lain memiliki dampak terhadap masalah tersebut sesuai dengan yang sudah terjadi.

2.1.2. Pengertian Kekerasan Simbolik

Jika membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan simbolik merupakan suatu hal yang bersifat abstrak atau tidak terlihat. Yang pada konsepnya menunjuk bahwa jarang diketahui oleh beberapa orang atau sebagian. Dari kekerasan ini karena kekerasannya tidak bisa dilihat oleh kasat mata tapi kekerasannya bisa dirasakan oleh orang jika sudah terkena dampaknya dan selalu kurang paham terhadap apa yang mereka lihat itu apa kekerasan simbolik atau bukan (Soerono, 2018:11).

Menurut Sortono (2016:51), menyatakan bahwa:

Suatu kekerasan yang sudah terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah selalu di kaitan dengan setiap proses dalam menghasilkan keuntungan demi bakal calon yang dijadikan sebagai pimpinan kedepan namun dibalik itu semua pasti ada kesenjangan yang terjadi karena pendukung nantinyalah yang akan terlibat untuk bertahan dan bisa saja kekerasan terjadi demi mempertahankan paslon yang mereka dukung.

Menurut Bourdieu (2021:5), pengertian simbolik bisa berisikan tentng:

Salah satu bagian yang sudah lama dipahami oleh masyarakat, akan tetapi masih saja ada warga yang tidak dapat membedakan apakah kekerasan itu sudah terjadi pada diri masyarakat atau tidak dan apakah berdampak keras kepada siapa pun pihak yang mengalaminya atau bagaimana.

Sejalan dari hal diatas, menurut Fashri (2007:89), bahwa:

Kalau dilihat dari segi penalaran bahwa kekerasan itu tidak lain suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai, memukul, memberikan cedera atau bahkan membunuh orang lain dengan cara mereka sendiri yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat yang terkena kekerasannya.

Pernyataan tentang kekerasan simbolik tersebut bisa berwujud sesuai penggunaan tindakan penghalusan, pengaburan, atau bahkan perubahan fakta, yang dapat menyakiti korbannya tanpa disadari. Ketahuilah jika seandainya kedekatan efektifitas kekerasan terjadi maka secara otomatis harus dijerat hukum yang sudah melakukan kekerasan tersebut namun dibalik itu terlebih dahulu diberikan efek jera atau peringatan kepada yang membuat kekerasan (Melokin, 2015:269).

Jadi, dari penjelasan diatas maka dapat dimaknai bahwa kekerasan simbolik itu aksinya mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaanya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi (Melahalin, 2019: 11).

Sehingga dari berbagai macam pengertian yang sudah diketahui dapat dikatakan bahwa kekerasan simbolik ialah suatu perubahan kekerasan yang sifatnya tidak terlihat dan bisa dirasakan kekerasannya namun kekerasan semacam ini sering dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan semata dalam politik misalnya dalam pemilihan legislatif dan sebagainya.

2.1.3. Jenis-Jenis Kekerasan Simbolik

Dari beberapa pembahasan pokok mengenai simbolik sudah sangat paham dari awal bagaimana keterbalikan ungkapan diberbagai masalah yang sudah berada baik dari segi berpolitik, begitu juga dengan posisi lain. Masalah dari satu ini rentang sekali memungkinkan terjadi secara sengaja demi kepentingan, tetapi untuk mengetahui sebenarnya tujuan diberberapa pernyataan tersebut ternyata hanyalah penguatan masyarakat jika terkena maka akan berdampak (Murdawati, 2018:45).

Adapun beberapa jenis-jenis kekerasan simbolik secara umum yaitu sebagai berikut:

Berkaitan dengan kekerasan atau tindakan yang berhubungan langsung dengan simbolik lebih ditonjolkan oleh keadaan yang sudah banyak terjadi diberbagai bidangnya sebagaimana telah diungkapkan dan disajikan secara detail dari penelitian yang artinya bisa dikemukakan masalah yang terjadi dan kemudian diberikan solusi pemecahan masalahnya sehingga alur penelitiannya akan berkaitan satu sama lain dengan tepat dan efektif (Hasfil, 2011:20).

Adapun juga jenis kekerasan simbolik yang sering terjadi dalam berpolitik yaitu *Pertama*, ketidaktahuan/tidak menyadari kekerasan simbolik itu sudah terjadi pada diri masyarakat itu sendiri *Kedua*, menginginkan posisi jabatan yang aman khususnya bagi para PNS dan honorer serta menginginkan keuntungan semata demi diri sendiri atau pribadi seperti menerima uang politik/money politik dan *Ketiga*, hoax di media sosial/internet tentang pasangan calon pada dasarnya semuanya itu hanyalah karangan semata supaya mendapatkan ketinggian beberapa hal tentang paham sesuatu dilaksanakan secara berlangsung serta mantap dalam segi yang memang dia geluti sekali (Bourdieu, 2020:56).

2.2. Politik Lokal

3.2.1. Pengertian Politik Lokal

Ketika membahas atau berbicara tentang politik maka itu berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi perubahan atas kemajuan untuk menunjang salah satu bagian dalam meningkatkan politik yaitu bersama beberapa anggota kelompok yang bisa berbicara dengan pengambilan sebuah keputusan yang efektif, digunakan ketika menginginkan keuntungan dari beberapa pemilihan politik, Namun sebelum jauh terjadi dikalangan masyarakat maka lebih baik diberikan pencegahan terlebih dahulu supaya pemimpin yang dipilih memiliki kualitas yang baik.

Sebenarnya pada saat tahapan politik kedepan ini secara tegas dijadikan sebagai alat dalam melakukan birokrasi untuk kepentingan masyarakat namun pada kenyataanya berbeda, bahkan lebih menjurus kepada politik uang dan penyuapan secara cara tersembunyi.

Dari Aristoteles (2020:65), mengatakan bahwa:

Politik Lokal dalam pelaksanaannya dari suatu Negara yang dikelilingi oleh bermacam perbedaan satu dengan yang lainnya bisa saja banyak sekali timbul dibenak masing-masing dari masyarakat tentang politik yang artinya bisa dijadikan sebagai acuan dengan pondasi yang tepat dalam melaksanakan pemilihan sehingga mungkin saja pada ranah politik ini makanya banyak terjadi kekerasan simbolik yang bersifat tersembunyi kekerasannya

Pemaknaan sebagian politik terhadap segi pandangan mulai dari (KBBI), bisa diperjelaskan sebagai berikut:

Secara sederhana dapat menyatakan bahwa dalam pemilihan itu berharga ketika, dipergunakan sesuai dengan perwujudan sebagai politik akan tetapi, berdiri tepat didepan umum itu juga segala sesuatu yang baik dibidang tertentu, tapi kuncinya dapat mempertahankan pemikiran dari pada pembicaraan yang tidak baik seperti ketika disinggung dimuka umum itu akan menjadikan politik tersebut dengan tidak stabil bahkan bisa saja gagal karena singgungan itu jika tidak berhati-hati menghadapinya.

Menurut Sudirman (2021:65), bahwa:

Secara tegas mengatakan bahwa sistem politik yang baik itu tidak terlepas dari kendali dalam motivasi untuk menolong sesama bahwa penilaian serta asumsinya yang terlalu ketinggian juga bisa menjatuhkan tanpa mengingat apakah faktanya sudah tepat atau masih belum.

Kalau kita berbicara sekitar politik dalam lingkupannya karena kekuasaan. Maka seharusnya tetap berkaitan dalam posisi yang selalu dikaitkan dengan masyarakat. Karena keseluruhan hal itu sebagai tujuan untuk melaksanakan pemilihan itu dengan aman. Maka perlu adanya pembicaraan serta pertimbangan bagi mereka yang memiliki kewenangan serta keinginan dibidang tersebut untuk menilai dan memberikan cara agar posisi tersebut tetap terkendali. "Dalam mencapai suatu pemilihan dalam politik yang dipimpin seharusnya oleh orang yang bisa diandalkan dalam segi politik juga dan harus layak dipergunakan oleh pemerintah agar bisa

meyakinakan rakyatnya” Politik lokal juga sering kali berkaitan dengan pemilihan dalam Daerah sesuai aturan yang telah ditetapkan, biasanya tetap dilaksanakan pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh masyarakat setempat guna untuk melihat dan memberikan hak mereka secara keseluruhan untuk memilih pemimpin yang layak dan berkualitas dibidang politik. Berbeda juga jika seandainya masyarakat tidak mengerti atau paham tentang bidang pendidikan politik.

Maka, dari situlah nantinya banyak sekali permasalahan yang akan timbul dan terjadi secara tiba-tiba dalam pemilihan, mengapa, demikian, karena masyarakat tidak paham akan maksud dari politik itu nah untuk itu, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan tersebut contohnya saja tidak bisa melihat karena faktor umur, atau karena tidak bisa berjalan sehingga tidak bisa datang ditempat pencoblosan suara. (Merialan, 2011:20)

Selanjutnya harus diberikan pembelaan atau fasilitas opsi lain kepada mereka yang mengalami keterbatasan itu oleh panitia yang bekerja dibidang pemungutan suara tersebut, serta menjamin keamanan dan kekondusif ditempat dilaksanakan pemilihan misalnya khusus legislatife dan lain sebagainya. Pada dasarnya politik lokal, dari kenyataannya sangat mengikuti proses penggunaan pengambilan keputusan secara teratur serta memberikan penyeleksian yang tepat pada masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin Daerah.

Dalam menilai kekuatan politik dari pemilihan perlu ada sesuatu yang dapat ditunjukkan perbedaan politik yaitu dengan adanya pemilihan yang layak dan tidak layak, bahkan dari dulu selalu menggunakan lidi termasuk didalamnya penyuaran dari masyarakat yang akan memberikan pilihannya dalam memilih pasangan calon yang mereka inginkan. Demikian juga dengan adanya perubahan disetiap pemilihan itu bisa juga digunakan oleh

masyarakat dalam melakukan pemilihan diberbagai bidangnya. Dan hal ini pun cukup sering digunakan pada saat itu dulu dengan tidak ada kekurangan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan sebagai salah satu bagian untuk melakukan atau melaksanakan pemilihan dalam tatanan politik lokal. Memang sebenarnya perlu adanya keterkaitan dan kelengkapan dukungan yang harus diikuti oleh masyarakat sehingga terbentuk pemilihan yang berkualitas dan layak sebagai pemimpin (Teodor, 2016:45).

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dalam politik lokal selalu dikaitkan dengan masyarakat, begitu juga dengan pemerintahan yang selalu memberikan keamanan bagi rakyat ketika adanya Penyelenggaraan pemilihan dibeberapa wilayah tertentu dalam sebuah Negara.

2.3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

2.3.1. Pengertian Pilkada

Dalam melaksanakan pemilihan yang berkaitan dengan aturan yang tepat maka dapat dikatakan bahwa sesuai dengan standar normalnya Pemilihan yang digunakan. Namun masih banyak juga yang kurang paham dalam melaksanakan pemilihan ini dikarenakan keterbatasan dalam melihat, kerusakan fisik lainnya akan tetapi, dengan tekad dan kesungguhan mereka maka bisa dilakukan melalui bantuan dari orang terdekat dan bisa juga dengan panitia pemungutan suara. Ini lah sebenarnya kasus yang banyak sekali kesenjangan yang mungkin saja akan terjadi ketika adanya Pemilihan Kepala Daerah ditempat pemilihan bisa saja mereka sengaja diprovokasi diberbagai sudut pandang oleh pihak lain karena mengapa mereka saja tidak percaya. Dengan apa yang akan dilakukan, karena keterbatasan tersebut untuk itu diperlukan sekali jasa bantuan dari panitia pemungutan suara dalam menemani masyarakat pencoblos suara pada saat pemilihan diselenggarakan.

Kemudian selain itu diperlukan juga penguatan dari beberapa bidang dalam menangani kasus kejadian seperti demikian, halnya dalam pemilihan ini dibutuhkan keseriusan, ketepatan, serta dukungan kuat dari pada penanganan yang akan diberlakukan mungkin bisa disesuaikan dengan normal aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemilihan di beberapa Daerah.

Sebagaimana dalam melaksanakan Pemilihan dalam bagian ranah Pilkada sangat dibutuhkan kemampuan dalam hal ketelitian dibidangnya masing-masing walaupun jauh berbeda namun tetap untuk dipergunakan demi kepentingan umum dan masyarakat luas dalam melaksanakan pemilihan di berbagai Daerah tertentu.

Maka dengan ini bisa kita menarik simpulan dari pembicaraan dari awal bahwa dalam melakukan serta melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah maka diperlukan sekali pengawasan yang sangat ketat, adil dan bermusyawarah demi kepentingan bersama. Akan perubahan pemimpin kelak dimasa yang akan datang dengan aksinya yang tepat dan menyuarkan hak rakyat.

Dengan pandangan Hikmat (2010:169-170), bahwa Pilkada langsung dapat memberikan pembelajaran politik dalam 3 aspek, ialah:

1. Membuat pengetahuan kesadaran antara rakyat dalam politik.
2. Memberikan serta melayani masyarakat dengan sepenuh hak untuk membela kaum lemah di berbagai bidang apapun itu demi kepentingan mutlak.
3. Tidak akan mengadakan perbedaan satu sama lainnya dengan status ekonominya tapi menggunakan persamaan tepat dan dibentuk ketertiban yang saling memahami satu dengan yang lainnya.

Pemilihan di beberapa Daerah harus diselenggarakan dengan baik jika melaksanakan pemilihan yang sudah dibuat untuk masyarakat layak dijaga dan dilindungi haknya. Itu semua demi ketentraman dalam Pemilihan, kemudian untuk kondisi pada saat terjadinya kekeliruan dalam Pemilihan maka harus ada pengamanan yang selalu siaga. Untuk menjalankan pemilihan yang kondusif maka harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan ³¹ dibuatkan oleh

Pemerintah, untuk menetapkan hukum juga wajib diberikan kepada siapa saja yang telah melakukan kesalahan kurang pantas dalam Pemilihan. Serta berusaha untuk mencari solusi dari berbagai masalah tersebut dalam Pilkada dan harus dipastikan akan keamanan yang aman terkendali.

Pengendalian secara terus menerus dilakukan kepada Putra Daerah dalam melakukan itu semua tidak terlepas dari berbagai pendekatan yang turut dilakukan dengan adanya penguatan yang diberikan melalui berbagai macam motivasi serta saran yang patut harus digunakan walaupun masih banyak sekali kesalahan dalam bidangnya akan tetapi, Pilkada yang dipergunakan harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh bagian partai politik yang sesuai dengan aturan.

Pada saat Penyelenggaraan Pemilihan di Daerah dalam pertarungan diarena Pilkada sangat dibutuhkan ke konsentrasian, keterbukaan suara dan pengawasan yang sangat serius realitanya konsistensi dalam melakukan kegiatan tersebut. Tidak hanya melibatkan satu personil rakyat semata akan tetapi, dibalik itu semua perlu ada kekuatan diberbagai segi sektor yang bisa digunakan oleh masyarakat bahkan bisa juga terbatas diberbagai sektor tersebut jika sering terjadi politik uang yang sudah sering dilakukan. Untuk itu diperlukan sekali pengawasan serta keamanan yang sangat serius dalam melaksanakan Pemilihan di beberapa Daerah karena jika terjadi kekacauan maka akan berdampak pada Penyelenggaraan Pilkada.

Partisipasi dalam mewujudkan semua ranah politik yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang maka diperlukan banyak motivasi, dari berbagai pihak dan melalui itu semua akan menimbulkan kekuatan baru di bidang tertentu ketika wajib dilaksanakan maka bisa saja mendapatkan sesuatu yang istimewa di mata masyarakat, dalam mendukung penuh pasangan calon maka harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan komunikasi

yang dilakukan antara masyarakat dengan pasangan calon Kepala Daerah dalam meningkatkan politik dalam beberapa Daerah tertentu yang sudah terpilih nantinya (Mekonan, 2014:149).

Penggunaan pembicaraan dalam Pemilihan maka bisa mengetahui semua hal yang berkaitan dengan permasalahan politik harus sangat terbuka, supaya jika dilakukan pemeriksaan maka bisa untuk mendapatkan jawaban sebagai bahan dalam mengevaluasi sesuai dengan standar posisi dalam aturan Pemilihan, dapat dikatakan juga dengan tepat dan benar untuk mengikuti prosesnya serta pertimbangan juga dibutuhkan di waktu tertentu dalam tantangan Pemilihan tersebut (Risan, 2013:143).

Keterbatasan penguatan politik itu sangat menyebabkan semua akan tertunda dengan tidak memperhatikan hal ini:

- 1) Seharusnya bagian yang menangani semua hal pembuatan tentang politik disesuaikan dengan aturan tetap.
- 2) Biasakan menggunakan sifat, serta sikap wajib taat pada Pemilihan yang akan dilaksanakan.
- 3) Mengenai Pemilihan dan keterkaitannya dalam Pasal 10 ayat 5 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah demi menunjang semua hal dalam politik untuk pemilihan yang diinginkan oleh masyarakat maka diperlukan keseriusan serta kekontinuitan untuk mengatasi setiap sudut kesalahan dalam Pemilihan. diamati lalu di tindak lanjutin setiap kedudukan yang diberikan kepada yang mengikuti prosesnya.
- 4) PP Pengganti dijadikan pedoman dalam menggantikan posisi dari setiap kesalahan dalam Pilkada di Daerah tertentu, kemudian diatur kembali lewat rapat perbincangan yang sesuai.

30

2.3.2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan bertujuan untuk memiliki penerus memimpin Daerah yang dapat menyuarakan suara rakyat dan menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas

dalam segi memimpin. Untuk itu jika salah sasaran digunakan maka akan berakibat fatal dampaknya kepada warga masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan sekali penyeleksian yang serius terhadap pelaksanaan Pemilihan yang akan dilakukan tersebut.

Mengikuti sosok yang begitu berpengaruh dalam politik hal mampu memberikan dampak yang begitu luas dibidang masyarakat, maka untuk itu selalu dikaitkan dengan permasalahan antara mana yang akan ditunjukkan sebagai pedoman dalam mengikuti efektivitas yang sangat bagus diwujudkan. Namun, bagaimanakah cara menciptakannya, sementara banyak sekali perbincangan yang kurang enak didengar dari telinga rakyat lalu buat apa dilakukan pemecahan solusi yang bisa saja dan kapan saja akan menyerang balik semua itu jika tidak waspada untuk menangani. Kemudian, memaksakan kehendak orang lain dengan haknya itu tindakan kurang pantas yang dilakukan, maka untuk itu harus diberikan pemahaman yang sesuai, karena dengan adanya hal itu masyarakat dapat terbiasa paham maksudnya serta tujuan bagi dirinya sendiri dan orang lain juga. Peningkatan cara pelaksanaan menegakkan keadilan dari pemilihan tidak mudah dibuat dari berbagai macam karena kesenjangan yang sering terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Santo, 2013:25).

2.3.3. Makna Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sejak berlakunya semua sistem Pemilihan ini serasa dimudahkan dalam penanganan diwaktu tertentu serta menaati aturan yang sesuai, serta telah diterapkan oleh bagian pembuatnya namun dalam kenyataannya sangat diperlukan sekali juga kekuatan yang penuh untuk mewujudkan kualitas dari berbagai aturan tersebut. walaupun tidak sesuai dengan politik yang diinginkan namun pada dasarnya semua itu harus dilaksanakan penuh percaya diri, sebagai serangkaian perintah. Karena itu diperlukan kekuatan anggota

penerusan yang layak untuk menciptakan tantangan hukum politik yang berkualitas dibidangnya masing-masing.

Dari beberapa Pemilihan yang sudah dilaksanakan dipenuhi kebersamaan dalam suatu proses yang begitu panjang sehingga diharapkan memperluas lagi keakraban masyarakat dalam pandangan mereka terhadap mempelajari pendidikan politik yang benar dan kritis. Menggunakan sebagian besar kekuatan untuk kepentingan pribadi dalam Pilkada akan mengalami tekanan jika diketahui dan dapatkan temuan dilapangan. Jika tidak mau seperti demikian maka, solusi ampuhnya yaitu melaksanakan sesuai keinginan yang ditetapkan oleh badan yang memiliki wewenang untuk itu. Keterkaitan politik dan Pemilihan sudah sangat dekat dalam ranah Pilkada. Masyarakat juga harus memberikan partisipasinya dalam melaksanakan pemilihan karena suara rakyatlah yang menentukan kemenangan dari pasangan calon yang akan menjadi pemimpin kelak dalam Daerah tertentu.

Menurut Sertan (2013:31), mengatakan hal berikut:

- 1) Pemilihan dalam ranah politik sangat ditunggu oleh rakyat yang sudah siap memberikan dukungan mereka dalam Pemilihan.
- 2) Menerapkan posisi politik kedalam suatu pernyataan yang tepat sesuai dengan aturan Pilkada.
- 3) Meningkatkan segala pengetahuan dimana hal ini digunakan sebagai pokok menjadikan pemilu itu menjadi berkualitas dimata masyarakat luas.

2.3.4. Manfaat Pilkada

Sebagaiman bahwa mampu bersaing dibidang politik dalam pemilihan dibutuhkan juga kekonsistenan dalam memilih jika pilihannya melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin Daerah maka dipastikan akan berjalan dengan lancar semua fasilitasnya. Pemilukada yang dilaksanakan tinggal menunggu waktu tepatnya

saja dalam melakukan coblosan kepada pemimpin yang sudah mereka inginkan ditempat pemungutan suara.

Pemanfaatan yang telah diselenggarakan Pilkada ketika menjadi pemilih pemimpin maka gunakanlah hak pilihnya rakyat sebaik mungkin, dalam memilih kelak pemberi perintah disetiap Daerah atau Pemimpin. Walaupun kadang banyak kesalahan dan keterlambatan yang selalu menghampiri mereka karena faktor memanipulatif sesuatu yang bersifat tersembunyi yang memungkinkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga, pada saat sekarang ini banyak sekali kepemimpinan yang kurang pas kinerja sehingga imbasnya terkena bagi masyarakat itu sendiri dampak dari perbuatan Pemimpin yang tidak sesuai kinerjanya tersebut.

Ketika memiliki niat menjadi calon Kepala Daerah maka diperlukan harus memiliki sifat yang menyuarakan suara rakyat, memiliki integritas dan wibawa yang berkualitas. Serta sifat egoism untuk kepentingan politik pribadi dihilangkan.

2.4. ¹ **Penelitian Yang Relevan**

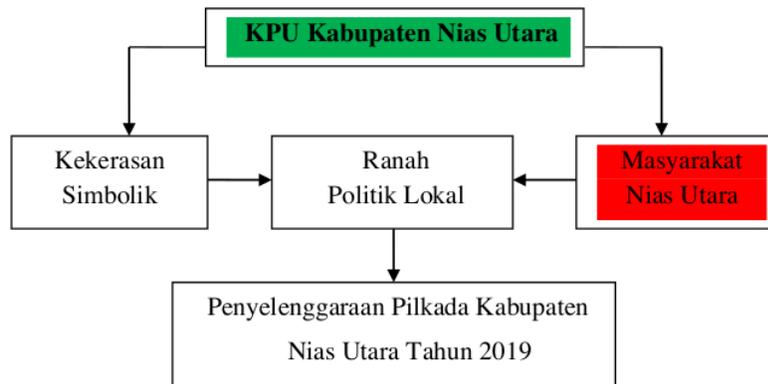
Dalam pelaksanaan **penelitian yang sudah dilakukan** dilapangan terdapat bagian **yang** berkaitan dengan penelitian relevan yaitu: “Skripsi kekerasan yang ditulis oleh Selfiani Mayaong Maman (2020), “Kekerasan simbolik pada ranah politik lokal melalui media massa dan slogan dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sulawesi Selatan Tahun 2019 suatu tinjauan analisis wacana kritis Pierre Boudieu.” Dan skripsi penelitian yang ditulis oleh M. Ilam Usman Idris (2021), “Kekerasan simbolik pada ranah politik lokal melalui media sosial dan Tantangan Implementasi Netralitas PNS dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019.”

Pengungkapan dari perbedaan sekarang bisa saja menjadikan bukti nyata pelengkapny dalam melalui kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengetahui tentang kekerasan simbolik pada ranah politik lokal dalam Penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu diperlukan sekali pemahaman

politik dalam Daerah untuk kesempurnaan Pemilihan tersebut yaitu untuk Kabupaten Sulawesi Selatan sedangkan penelitian sekarang adalah di Kabupaten Nias Utara.

2.5. Kerangka Berpikir

Untuk memberikan pemahaman tentang alur berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan berdasarkan konteks masalah, maka akan digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 01. Bagan Kerangka Berpikir

Keterangan:

- = Alur Berpikir
- = Objek Penelitian
- = Subjek Penelitian
- = Lokasi Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka berpikir yang telah digambarkan di atas oleh peneliti maka, menunjukkan bahwa garis tanda panah berwarna hitam adalah alur berpikir, kemudian objek penelitiannya adalah kekerasan simbolik, ranah politik lokal pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Sedangkan, subjek penelitiannya adalah masyarakat Nias Utara, dan lokasi penelitian yaitu di KPU Kabupaten Nias Utara. Dengan terbukanya hal itu, maka seharusnya memiliki tujuan ketika melaksanakan semua pasti yaitu dalam

menganalisa sekali bagaimana kekerasan simbolik yang ada pada Penyelenggaraan Pilkada, untuk mengetahui mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019 dapat terjadi, dan untuk mengetahui bagaimana upaya KPU Kabupaten Nias Utara mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.

METODE PENELITIAN**3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian****3.1.1. Pendekatan Penelitian**

Biasanya pendekatan yang sering digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu pendekatan deskriptif dengan metode mempertanyakan. Menurut Fitrah (2017:36), pendekatan deskriptif merupakan temuan penelitian yang membuat peristiwa saat sekarang maupun setelah masa lampau. Pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk menggali makna tersendiri dari dalam penelitian agar mendapatkan data dengan menggunakan data yang lengkap. Menurut Nasution (2015:5), dari berbagai macam keadaan pada dasarnya metode penelitian dapat berinteraksi dalam bentuk tertentu, sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam menerapkan metode kualitatif dalam penelitian tersebut.” Selanjutnya Maizuar (2016:22), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah yang sering terjadi dalam penelitian terhadap teknik yang salah digunakan, dalam meneliti ataupun bahan data yang kurang pas.

Alasan digunakan pemecahan masalah terhadap metode ini disebabkan karena menurut peneliti hendak menggambarkan Upaya KPU Kabupaten Nias Utara mencegah Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang keadaan suatu subjek. Dengan menggunakan pendekatan ini data dapat diperoleh lebih lengkap untuk jawaban atas pertanyaan peneliti.

3.2. Variabel Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang bagus dan tepat dapat digunakan terhadap penelitian yang menarik untuk dipelajari dengan

menggunakan teknik cukup sederhana sehingga ketika sudah memperoleh informasi mengenai penelitian melalui kelengkapan data yang jelas maka akan dilanjutkan kepenelitian berikutnya dengan penuh semangat dan selalu percaya diri untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap apa yang telah diperoleh dari penelitian dilapangan. Untuk itu variable penelitian ini sangat erat kaitannya dengan segala pengetahuan yang berada dalam fokus penelitian yang telah dibuat dari latar belakang pennenelitian (Sugiyono, 2013:38).

15

3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Tempat dimana melaksanakan **penelitian** itu **adalah** KPU Kabupaten Nias Utara. ini terletak di Jln. Arah perbukitan, yang berdekatan dengan jalan Gowe Zalawa di Nias Utara

Adapun alasan peneliti memilih KPU Kabupaten Nias Utara sebagai lokasi penelitian adalah:

1. Jarak lokasi penelitian dapat dijangkau oleh peneliti.
2. Untuk mengetahui dan memahami seperti apakah Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.

Sebagain yang menjadi sumber informasi yang didapat yaitu:

1. Ketua KPU Kabupaten Nias Utara, Ketua KPU dianggap sebagai informan yang paling tepat oleh peneliti karena merupakan orang yang banyak memahami dan mengetahui tentang persoalan apakah kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 sudah terjadi apa belum.
2. Masyarakat Nias Utara, Masyarakat juga di anggap sebagai informan yang tepat dalam penelitian ini karena, pada saat ini masyarakatlah yang mengalami dampak kekerasan simbolik dalam Pilkada, serta banyak tau tentang kekerasan simbolik

apakah sudah terjadi dan sekaligus sebagai pemilih pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019.

3.3.2. Jadwal Penelitian

Dalam pelaksanaan jadwal kedatangan ditempat penelitian yaitu di Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

NO	KEGIATAN	2022-2023						
		April 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agustus 2023	Sep 2023	Oktober 2023
1	Pembuatan rancangan dalam penelitian							
2	Revisi rancangan							
3	Seminar rancangan penelitian							
4	pemberian dan pengambilan izin							
5	Pengumpulan Data							
6	Analisis bahan data							
7	Ujian Skripsi							

Tabel 01. Jadwal Perancangan Penelitian

3.4. Sumber Data

Menurut Hardani (2021:22), data penelitian terbagi 2 ialah:

1. Data Primer

Berkaitan dengan sumber data yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian maka diperlukan cara bagaimana seharusnya dalam menemukan pemecahan masalah tersebut

agar setiap bahan yang digunakan dapat diklarifikasikan kedalam bentuk kalimat dalam penelitian dan dengan mudah juga pembaca mengerti akan datanya yaitu Ketua KPU dan Masyarakat Kabupaten Nias Utara pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Begitu juga dengan model data yang kedua ini biasanya digunakan dalam bentuk data bahanya yaitu untuk mengkaji berbagai permasalahan yang didapatkan atau ditemukan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa bahan ini juga berkaitan ketika dokumen pemptuhan digunakan serta akan mendukung semua berbagai sumber bahan sekundernya yaitu data yang diambil dari KPU Kabupaten Nias Utara.

3.5. Instrumen Penelitian

Persamaan ketika banyak instrumen penelitian yang kurang sesuai selain dari penelitian yang sudah banyak dilakukan maka diperlukan melihat lebih jauh lagi bagaimana bentuk pelaksanaannya didalam penelitan, yang dapat digunakan. Setelah itu kemudian memastikan ketepatan instrumen penelitian tersebut bisa mencapai proses dari kebenarnya terhadap apa saja yang sudah dilakukan dalam penelitian, serta memberikan penjelasan terkait penelitian yang sudah dilakukan tersebut supaya pembaca tidak bingung dalam menilai alur dari penjelasan yang akan diteliti (Sugiyono, 2016:305).

Teknik yang digunakan sudah termasuk kedalam pertanyaan kritis yang semakin lama menemukan kelebihan dari satu hal ke bagian lain demi kemajuan dalam melihat, serta mengamati segala apa yang berkaitan dimasa lampau dalam proses pelaksanaan penelitian. Untuk itu diwajibkan penelitian mendapatkan bahan data yang tepat serta menggunakan variable yang tepat dan efektif sesuai dengan keterangan dari seorang informan yang jelas dan bisa diajak berbicara dan mengerti tentang penelitian tersebut serta tahu dengan jelas bagian mana saja nantinya jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepadanya sehingga bahan data yang didapatkan bisa digunakan untuk melanjutkan penelitian keproses berikutnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik seringkali kerap dilakukan dan diberikan untuk mendapatkan penelitian melalui hal:

a. Teknik Observasi

Soekanto mengatakan (2021:109), bahwa:

Dengan adanya suatu pengumpul data yang dilakukan dalam mengatur penelitian maka perlu dimunculkan pertanyaan kepada individu atau informan sebagai bentuk dalam mendapatkan kelengkapan data.

Kemudian penelitian kualitatif berfokus pada Upaya KPU Nias Utara mencegah Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Untuk observasi yang dilakukan peneliti adalah memperoleh data tersebut dengan cara pengamatan langsung.

b. Teknik Wawancara

Sebagain besar bisa digunakan metode memberi pertanyaan yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan sekitar informasi yang sedang dihadapi namun, pada kenyataannya proses penelitian yang sudah sangat lama dilakukan namun pemecahan masalahnya masih belum ditemukan. Pada saat melakukan teknik ini, dibutuhkan kesabaran dan ketelitian untuk menangkap setiap pertanyaan dan jawaban yang bisa saja cepat dilontarkan oleh infoman akan membuat kewalahan menangani hal ini. Disamping itu kita tidak perlu khawatir, karena bisa digunakan alat perekam dalam menyimpan informasi dari jawaban yang sudah diberikan oleh informan yang menjawab pertanyaan tersebut serta disesuaikan.

c. Teknik Mengambil Data

Bisa saja teknik yang bagian ketiga ini mengalami kendala sewaktu melakukan penambahan daftar bahan penelitian yang cukup rumit jika dibandingkan dengan yang tidak punya alat untuk menggambarkan, maka sama ajah artinya tidak bisa sehingga keperluan yang sangat dibutuhkan segera mungkin untuk dipenuhi oleh penelitian serta menyatakan keadaan atau kondisi dalam menangani proses selanjutnya.

Bagian dari saran Mekogan (2021: 329), ialah:

Untuk memenuhi pendokumentasian yang tepat dan rapih maka diharuskan memfokuskan penelitian ini dengan mencari segala sumber yang berkaitan dengan metode penelitian yang bisa digunakan dalam mengatasi kekerasan simbolik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Negara tertentu.

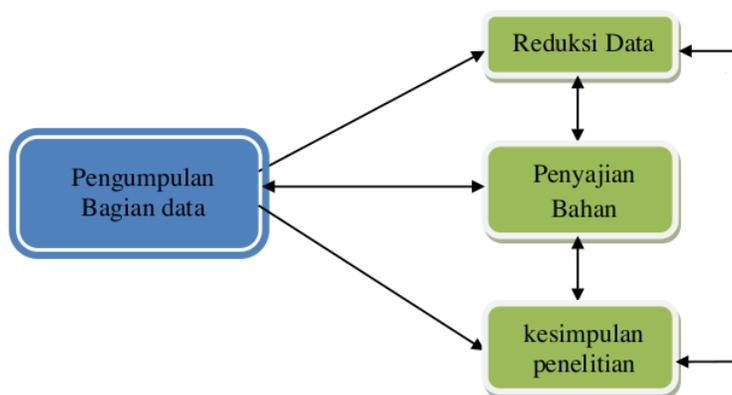
Biasanya dalam pengambilan gambar dokumentasi selalu mengarahkan kita kepada bagaimana bukti yang nyata yang bisa digunakan pada saat melaksanakan penelitian dilapangan dengan sesungguhnya.

Kemudian salah satu alat yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian dalam bidang lapangan penelitian yang sudah diteliti, perlu pemastian yang tepat terhadap hal tersebut misalnya saja HP ini bisa digunakan sebagai bantuan dalam menangkap suara pembicaraan pada saat diruang sesi menanyakan terkait dengan bahan serta data pendukung pada saat penelitian berlangsung.

26 3.7. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan penelitian, menggunakan analisis data terhadap penelitian yang sudah didapatkan atau diperoleh dari penelitian maka dapat menggunakan analisis data hasil observasi awal atau data sekunder. (Huberman, 2018:15) seperti telah dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan dapat berjalan lancar serta alur jelas. Maka tidak akan membingungkan pembaca.

Secara umum diperlukan skema agar bisa memperjelaskan bagian alurnya penelitian dengan baik dan benar yakni:



7

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil pengamatan (observasi), serta wawancara, dan dokumentasi dapat dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Maka, ada sebuah catatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan sebagian besar keseluruhan penelitian yang menyatakan dengan sendirinya baik secara tertulis maupun lisan (Sugiyono, 2015:197).

13

b. Reduksi Data

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini jika bagus secara keseluruhan maka kita memperolehnya dengan tepat dan berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian sering terbuka dalam mengetahui penelitian yang terjadi dalam politik (Sugiyono, 2015:341).

13

c. Penyajian Data

Penyajian data yang teratur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan maka pasti akan memiliki tujuan yang baik dan bahkan bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan dalam menyajikan data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian misalnya saja dalam Pemilihan Kepala Daerah jika dikaji hal demikian maka berkaitan dengan penyuaran suara masyarakat terhadap pemilihan (Herdiansyah, 2013:131).

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu upaya dengan memilih atau memahami arti, sesuai dengan pola kejelasan penelitin, namun urusan seperti demikian tentu pasti akan membuahkan hasil wujud yang baik pada waktu tertentu biasanya diharapkan ketika mencari sebuah permasalahan ketika sudah menemukan masalah maka mampu menilai bagaimana pokok penyelidikannya serta dapat menarik kesimpulannya (Sukmadinata, 2009:220).

HASIL DAN PEMBAHASAN**4.1. Paparan Data**

KPU dari Nias Utara bisa dikatakan bahwa begitu terjadinya pelaksanaan Pemilihan waktu itu sangat membuahkan hasil yang tegang akan tetapi ketika semua bisa diatasi dengan baik maka itu berjalan dengan lancar, yang berada dari bagian Sumatera Utara, Indonesia yang didirikan pada Tahun 1999. Terletak di Jln. Gunungsitoli-Lahewa No. Km. 43. Hilinduria. Kec. Lotu, Kabupaten Nias Utara.

Mulai dari awal berdirinya sampai pada saat ini, dalam perwujudannya ketika dipergunakan selalu menjadi pemenuhan kelengkapan, dari Penyelenggaraan terbuka diadakan diberbagai wilayah maka semua itu tidak terlepas dari pantauan jarak dekat maupun jauh oleh para pencalon yang akan melaksanakan pemilihan pada saat akan tiba diwaktu yang tepat saat pelaksanaan Pemilihan (Fokinan, 2001:11).

4.1.1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Nias Utara**a. Visi KPU Kabupaten Nias Utara**

“Mewujudkan semua para Pemilihan yang kreatif dibidang tertentu demi menggapai tujuan bersama dan keselaran singkat padat dan jelas pada Pemilihan.”

b. Misi KPU Kabupaten Nias Utara

1. Perubahan pemilihan itu berasal dari diri sendiri dan dilaksanakan kedalam bentuk penyuaran yang baik dan benar.
2. Mampu Memperkuat pelaksanaan Pemilihan dengan keseluruhan masyarakat bisa dilakukan dengan niat benar dan efektif.
3. Cukup meningkatkan fasilitas dukungan yang bisa digunakan seperti terdiri dari kesepakatan yang bisa meningkatkan pilihan masyarakat untuk pemimpin menjadi lebih baik kelak sebagai calon pimpinan masyarakat.

4. Menginginkan peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat untuk diikuti sertakan demi kenyamanan dari pemilihan.
5. Melaksanakan kekuatan tak terbatas dalam bentuk keamanan.
6. Posisikan hal yang bisa digunakan saja dari pada sumber pemilihan positif yang sering digunakan.
7. Menjalankan Penyelenggaraan pemilu yang positif, terjaga, dan terlindungi sehingga dapat memahami bagian akan dikajikan.

4.1.2. Tujuan KPU Kabupaten Nias Utara

1. Bagian pelengkapannya semoga terwujud dengan sendirinya dalam jangka waktu tepat dan efektif dalam hal apapun itu.
2. Dengan adanya dukungan penuh dari warga masyarakat maka akan menjadikan pemilu yang berkualitas dibidangnya.
3. Dikemukakan dengan logika pemilihan untuk memaksakan pada dua asas keadilan tantangan yang baik bisa dipergunakan.
4. Perlu kesabaran dan peningkatan waktu lama dengan kesadaran dari keseluruhan bagian terkait khususnya rakyat.
5. Daya guna terselenggarakan semua hal itu menjadikan cara secara berurutan dengan aman dan berkualitas dibidangnya sendiri.

4.1.3. Keadaan Pegawai dan Honorer KPU Kabupaten Nias Utara

Tabel 02.

Keadaan Pegawai dan Honorer KPU Kabupaten Nias Utara

NO	NAMA/NIP	JK	JABATAN
1.	Evorianus Harefa, S.E NIP. -	L	Ketua

2.	Petrus H. Panjaitan, S.H., M.H NIP. 198705272010121005	L	Sekretaris
3.	Inotonia Zega, M.Th NIP. -	L	Anggota
4.	Elisama Nazara, S.Pd NIP. -	L	Anggota
5.	Karyanto Lase, S.E NIP. -	L	Anggota
6.	Munawaroh, S.Pd NIP. -	P	Anggota
7.	Gaya Hutagalung, S.E NIP. 198008252008112001	L	Kasubbag Keuangan Umum, dan Logistik
8.	Syukur K. Zendrato, S.E NIP. 197207182010011020	L	Kasubbag Teknis dan Hupmas
9.	Velly Sondang Hutagalung, S.E NIP. 197901172006042009	L	Kasubbag Perencanaan, Data, Informasi
10.	Yaatulo Harefa, S.E NIP. 197910192006051001	L	Kasubbag Hukum dan SDM
11.	Ali Armadi Milala, S.Sos NIP. 198512132019031004	L	Staf
12.	Ary Rusanby Sitepu, S.E NIP. 199107252019031010	L	Staf
13.	Hans S. Atmojo Nabapdap, S.H NIP. 199306162019031004	L	Analisis Hukum
14.	Herwanda Tarigan, S. Kom NIP. 199311252019031009	L	Staf
15.	Delianus Zalukhu NIP. 198305032006051001	L	Staf
16.	Megawati Zebua NIP. 198711022010012025	P	Staf
17.	Serius Zega		

	NIP. 198506082011011010	L	Staf
18.	Aziz Badril Nazara NIP.-	L	Staf

(sumber: diolah dari dokumen KPU Kabupaten Nias Utara)

4.2. Temuan Penelitian

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yaitu KPU Kabupaten Nias Utara, pada pelaksanaan yang dilakukan dalam ranah politik lokal selalu berkaitan dengan penekanan dibagian berpolitikan khususnya kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara, bahwa Ketua KPU dianggap sebagai informan yang paling tepat oleh peneliti karena, merupakan orang yang banyak memahami dan mengetahui tentang persoalan apakah kekerasan simbolik pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 sudah terjadi apa belum. Serta Masyarakat Kabupaten Nias Utara, Masyarakat juga di anggap sebagai informan yang tepat dalam penelitian ini karena, pada saat ini masyarakatlah yang mengalami dampak kekerasan simbolik dalam Pilkada serta banyak tau tentang kekerasan simbolik apakah sudah terjadi dan sekaligus sebagai pemilih pada penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Perlu banyak sekali pertimbangan ketika sudah mendapatkan permasalahan maka harus dipecahkan solusi seperti apa cara yang bisa digunakan dalam mengatasi semua yang berkaitan dengan pembahasan itu dengan baik serta efektif.

Adapun temuan kedapatan yang diperoleh telitiannya sebagai berikut:

4.2.1. Bagaimana Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Demikian juga terkait perubahan yang kurang sejalan atas keterkaitan di KPU Kabupaten Nias Utara bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2019 telah terlaksana dengan begitu baik seiring berjalannya proses tersebut pada pemilihan selalu dikaitkan dengan kekerasan simbolik. Namun, dalam Penyelenggaraannya terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi pada Pilkada Tahun 2019. Sebagaimana diungkapkan oleh

Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara),
yang menyatakan bahwa:

Dalam penggunaannya politik dalam Pemilihan bisa dikatakan bahwa Nias Utara pada Tahun 2019 ini ada beberapa kekerasan yang terjadi salah satunya kekerasan simbolik yang ada pada penyelenggaraan Pilkada yaitu: dikaitkan dengan isu money politik dengan memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Pada pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara sering dikaitkan dengan peristiwa politik uang. Setiap Calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditujukan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Pengetahuan yang tidak menyeluruh ditengah masyarakat, peristiwa politik uang dianggap hal wajar dan cukup lazim, Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaan tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon pemimpin Daerahnya secara bijak. (Wawancara, Jumat 28 Juli 2023)

Hal Senada juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada memang sudah terjadi di Kabupaten Nias Utara pada Tahun 2019. Seperti, money politik/suap, Berita hoaks di media sosial/internet, dan mengejantawahkan PNS dan honorer berada dalam posisi dilematis, setiap pasangan calon Kepala Daerah merencanakan taktiknya untuk mencari dukungan dari pihak manapun termasuk mengaitkan para PNS maupun honorer tersebut. Baik dibidang pendidikan maupun perkantoran, Pasangan calon Kepala Daerah dalam relasi sosialnya mengakui bahwa PNS dan honorer dengan memberikan jaminan pekerjaan yang layak jika mereka

dipihak Pasangan calon ter sebut. Sebuah keuntungan yang tidak disia-siakan oleh siapa pun PNS dan honorer yang menerima peluang tersebut karena menghendaki posisi aman. Namun, pada celah tertentu tidak disadari bahwa keadaan yang menguntungkan tersebut kenyataannya telah mengenai mereka sebuah kekerasan simbolik yaitu tidak memiliki hak bebas untuk menentukan pasangan calon Kepala Daerah pilihannya. (Wawancara, Senin 31 Juli 2023)

Selain itu, Penyelenggaraan Pilkada hampir semua dipicu oleh terjadinya konflik diantara warga, terutama diantara warga yang memiliki pilihan Pasangan calon Kepala Daerah yang berbeda. Hal ini pun terjadi akibat fenomena belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Aldo Zalukhu, S.E. (Staf KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Dalam konteks Penyelenggaraan Negara yang demokratis, Pemilihan dari segala hal secara mendalam pasti akan bergantung kepada proses yang sudah digunakan dari Nias Utara sering muncul konflik kekerasan seperti kekerasan simbolik yaitu berita hoaks Setiap pasangan calon Kepala Daerah pasti melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri. Salah satu wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebarakan dimedia sosial sebagai suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial terhadap masyarakat belum tersampaikan dengan jelas karena terjadi kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi penyebaran *hoax*. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon. Pada akhirnya baik pasangan calon maupun masyarakat tanpa disadari telah mengalami kekerasan simbolik. Pasangan calon ditimpa kekerasan merasa dihianati oleh anggota kepercayaannya, sedangkan masyarakat tanpa menyadari telah mengalami kekerasan didustakan. (Wawancara, Rabu 2 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Penyelenggaraan Pilkada yang terjadi pada Tahun 2019, sudah terlaksana Pada saat waktunya tiba, namun dibalik itu diperlukan penyesuaian dari beberapa hal yang terikat dalam kepentingan tertentu disana. Seperti terdapat peristiwa yang sering terjadi pada saat itu ialah kekerasan simbolik dalam bentuk menjelek-jelekan Pasangan calon melalui media sosial/internet, sesuai pernyataan tersebut maka cukup serius untuk diberikan solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat itu dulu. Bahkan calon yang ikut serta sebagai pendukung yang tidak siap menerima kekalahan dalam pemilihan. Salah satu yang lebih kerap muncul pokok permasalahannya adalah politik uang tapi jarang dimunculkan bahkan telah menerima. Sesuai dengan pernyataan Bapak Karyanto Lase Masyarakat Kabupaten Nias Utara menyatakan bahwa money Politik/suap hal ini dikaitkan dengan masyarakat dikarenakan salah satu faktor agar suara masyarakat bisa berada pada pihak pencalon. Dengan melakukan berbagai upaya dan strategi dengan caranya sendiri, demi untuk menang. Salah satu ide politik uang ini dengan mengarahkan anggota kepercayaannya untuk beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima dan tanpa disadari sebenarnya dalam hal itu kekerasan simbolik sudah terjadi pada diri masyarakat yaitu tanpa sengaja pilihan calon Kepala Daerah yang mereka inginkan tidak bebas menentukan pilihannya masing-masing (Wawancara, Jumat 4 Agustus 2023)

Untuk itu dari beberapa penjelasan dari atas dapat di tarik kesimpulannya yaitu, biasanya bagian yang dimunculkan dari Kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan yang dilakukan pada saat di Nias Utara dari Tahun 2019 yaitu berkaitan dengan isu money politikan uang, jelas suap, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah dan adanya mengejantawahkan PNS dan honorer berada dalam posisi dilematis.

4.2.2. Mengapa Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi

Dengan adanya Pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemilihan terbuka yang mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan Nias Utara dari Tahun 2019, sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dibalik itu telah terjadi beberapa peristiwa seperti adanya kekerasan simbolik dalam penyelenggaraan tersebut. Sehingga penyebab terjadinya hal itu di karena ada beberapa faktor.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dukungan kesempurnaan telah banyak di ketahui lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan simbolik pada sebutkan saja agar dapat memahami bagian sudah sangat dibuat Nias Utara pada saat 2019 yaitu adanya faktor ketidaktahuannya/tidak menyadari adanya kekerasan simbolik ini. Hal tersebut sebenarnya terjadi akibat rendahnya atau belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat. Ketika adanya Penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan, masyarakat memang ikut turut berpartisipasi dalam memilih pasangan calon yang diinginkan masing-masing. Akan tetapi terkadang dan cukup lazim terjadi ketika masyarakat menginginkan keuntungan yang semata, dalam memenuhi kebutuhan hidup atau pribadinya, maka tanpa sadar rakyat pun mencari keuntungan dibalik hal tersebut. Seperti ketika pasangan calon Kepala Daerah memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini, memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditunjukkan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaannya tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon Pemimpin Daerahnya yang mereka inginkan. (Wawancara, Selasa 8 Agustus 2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum KPU Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan Simbolik dalam kekerasannya bisa saja digunakan sebagai penunjang dimana bisa digunakan pada saat di Nias Utara pada Tahun 2019 selalu diikutkan dalam pemilihan yang cukup menonjol sekali dari segi kekerasan tersebut ialah salah satunya faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan pribadi khususnya bagi PNS dan honorer. Pada Penyelenggaraan tersebut masyarakat khususnya PNS dan honorer selalu menjadi objek kekuatan politik karena dibawa perintah Kepala Daerah. Sehingga mau tidak mau PNS dan honorer harus mengikuti alur perintah tersebut karena ketika tidak menjalankan perintah Kepala Daerah. Maka, posisi jabatan yang dulunya ditempati oleh PNS dan honorer dapat saja tergeser dari posisinya yang semula, dan demi mendapatkan kelayakan sebuah sesuatu begitu pula dengan kekurangan dimiliki serta jabatan yang aman maka tanpa berpikir panjang masyarakat pun khususnya PNS dan honorer harus mengikuti perintah dari Kepala Daerah tersebut. Artinya masyarakat berada pada posisi tertekan, tidak bebas menentukan pilihan calonnya. (Wawancara, Kamis 10 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Kekerasan simbolik ini dapat konfilkan dari berbagai maksudnya dalam keinginan untuk melihat serta secara segala prosesnya lengkap. Karena ada faktor penyebab salah satunya yaitu hoaks yang ada di berita media sosial/internet atau menjelek-jelekan itulah salah satu sikap kurang mengenakan cukup banyak terjadi sebagaimana dari contohnya ketika saat melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersediri calon tersebut. Dan pertimbangan selalu ada serta mengikuti prosesnya sehingga kesemuanya itu bisa dengan mudah melalui jalan jalur begitu mudah. Kegiatan tersebut juga tidak luput untuk didokumentasikan untuk disebarkan dimedia sosial. Namun disamping itu, banyak sekali kejanggalan dimana hal tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dari pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial itu belum tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas karena ada permainan atau kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi hoax, tidak lain pelaku kecurangan tersebut tangan

kanan dari kepercayaan pasangan calon. Sehingga tanpa mereka sadari kekerasan simbolik sudah berada pada diri mereka, baik itu pecalon maupun masyarakat. (Wawancara, Jumat 11 Agustus 2023)

Dengan demikian dari beberapa penjelasan dari atas dapat ditarik kesimpulannya ialah, bahwa Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi karena *Pertama*, faktor ketidaktahuan/tidak menyadari kekerasan simbolik itu sudah terjadi pada diri masyarakat itu sendiri *Kedua*, faktor menginginkan posisi jabatan yang aman khususnya bagi para PNS dan honorer serta menginginkan keuntungan semata demi diri sendiri atau pribadi seperti menerima uang politik/money politik dan *Ketiga*, faktor hoax di media sosial/internet tentang pasangan calon.

4.2.3. Bagaimana Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah terjadinya kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Untuk dapat mengetahui sebagaimana dari posisi kekerasan simbolik itu maka akan diungkapkan lewat beberapa pengamatan oleh informan peneliti dari Kabupaten Nias Utara, adapun upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah terjadinya kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 seperti diungkapkan oleh Bapak Evorianus Harefa, S.E. (Ketua KPU Kabupaten Nias Utara), menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu salah satunya dengan memberikan penguatan dalam bentuk agar mereka dapat menerapkan dalam kehidupan masing pribadi. Politik dengan mendatangi langsung masyarakat, dikarenakan agar masyarakat dapat memahami pendidikan politik yang bisa digunakan dan yang tidak bisa, dan seperti apa politik yang baik dan jujur itu artinya dengan adanya pemahaman yang

dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya politik ini contohnya saja adanya money politik/suap. Dengan melalui perantara tangan kanan atau anggota kepercayaan pasangan calon beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima. Sehingga dengan adanya pemahaman pendidikan politik maka, masyarakat juga mengerti dan tau bahwa itu akan mengakibatkan dampak bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka Penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan kekerasan simbolik pun teratasi bagi kehidupan masyarakat. (Wawancara, Senin 14 Agustus 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh S.Pd (Anggota dan Sekaligus sebagai Kasubbag Umum dari pembedangan dari Nias Utara), bahwa:

Dengan upaya yang sudah dilakukan untuk diri mereka yang telah berusaha agak mencegah kekerasan simbolik supaya melindungi hak dan kewajiban dari rakyat maka perlu pemahaman yang baik yang harus dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya baik di Tahun 2019 yaitu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat. (Wawancara, Rabu 16 Agustus 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Karyanto Lase, S.Pd (Masyarakat Kabupaten Nias Utara), bahwa:

Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah, dan memberikan juga pemahaman kepada masyarakat seperti apa bahayanya ketika bermain dengan politik uang, memanfaatkan atau mengambil keuntungan yang semata demi memenuhi kebutuhan secara pribadi masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya seminar ini dapat mengatasi kekerasan simbolik dalam Pemilihan Kepala Daerah. (Wawancara, Jumat 18 Agustus 2023)

Dengan adanya penjelasan dari beberapa permasalahan yang sudah dibahas diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik pada saat itu masih banyak sekali pemaksaan, kemudian kurang tepat solusi pemecahan masalah dan dalam pengambilan sebuah keputusan di Tahun 2019 kurang tepat yaitu *Pertama*, dengan penguatan sangat kurang tentang bagaimana sebenarnya politikan itu bagi mereka, *Kedua*, melakukan pendekatan terbuka bagi kalangan warga saja tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, *Ketiga*, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

4.3 Pembahasan

Penelitian yang sudah dilaksanakan dengan proses yang begitu rumit dilakukan dengan baik sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh peneliti maka bisa lebih diperjelas lagi mengenai Upaya KPU Kabupaten Nias Utara mencegah Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019. Jadi untuk itu demi memudahkan seorang pembaca dalam melihat serta mengamati alurnya penelitian maka bisa diperjelaskan sebagai berikut.

4.3.1. Bagaimana Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada hal tersebut bisa muncul karena ada faktor penyebabnya. Menurut Bourdieu (1994:134), Adapun simbolik yang berkaitan pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu:

1. Isu politik uang (money politik).

Dulu dan sekarang masih saja sama ketika ranah Pemilihan akan selalu dikaitkan dengan isu (money politik) salah satunya dengan memberikan iming-imingan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini, memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditujukan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima (Michal, 2020:42).

2. Kabar atau berita hoaks dimedia sosial/internet.

Dalam pelaksanaan Pemilihan pasangan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara juga terdapat kabar atau berita *hoax* tentang calon Kepala Daerah melalui media sosial. Sehingga hal tersebut, akan berdampak negatif terhadap pasangan calon Kepala Daerah. Setiap pasangan Penguatan calon itu selalu berkaitan erat mengikuti aturan dari bagian lengkap sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri. Salah satu wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebarakan dimedia sosial sebagai suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial terhadap masyarakat belum tersampaikan dengan

kelas karena terjadi kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi penyebaran *hoax*. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon (Fikaron, 2015:132).

3. Mengejantawahkan PNS berada dalam posisi dilematis.

Pada pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara, ditemukan juga kasus mengejantawahkan PNS dan honorer. Setiap pasangan calon Kepala Daerah merencanakan taktiknya untuk mencari dukungan dari pihak manapun termasuk mengaitkan para PNS maupun honorer baik dibidang pendidikan maupun dibidang perkantoran dan bidang lainnya. Pasangan calon Kepala Daerah dalam relasi sosialnya mengakui para PNS dan honorer dengan memberikan jaminan pekerjaan yang layak jika mereka dipihak pasangan calon tersebut. Sebuah keuntungan yang tidak disia-siakan oleh siapapun PNS dan honorer yang menerima peluang tersebut karena menghendaki posisi aman. Namun, pada celah tidak disadari bahwa keadaan yang menguntungkan tersebut kenyataan telah mengenai mereka sebuah kekerasan simbolik yaitu tidak memiliki hak bebas untuk menentukan pilihannya, dalam arti berada pada posisi dilematis dan dibawah tekanan, tidak memilih maka *nonjob* (Riawanti, 2022:39).

4.3.2. Mengapa Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi

Kekerasan simbolik dapat dimaknai sebagai suatu praktik kekerasan yang aksinya mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaanya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi.

Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi sebagai berikut:

1. Faktor ketidaktahuannya/tidak menyadari adanya kekerasan simbolik.

Adanya faktor ketidaktahuannya/tidak menyadari adanya kekerasan simbolik ini, Hal tersebut sebenarnya terjadi akibat rendahnya atau belum dewasanya pendidikan politik dalam masyarakat. Ketika adanya Penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan, masyarakat memang ikut turut berpartisipasi dalam memilih pasangan calon yang diinginkan masing-masing. Akan tetapi terkadang dan cukup lazim terjadi ketika masyarakat menginginkan keuntungan yang semata, dalam memenuhi kebutuhan hidup atau pribadinya, maka tanpa sadar rakyat pun mencari keuntungan dibalik hal tersebut. Seperti ketika pasangan calon Kepala Daerah memberikan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. Setiap calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Jadi diposisi inilah sebenarnya terjadi kekerasan simbolik kepada masyarakat tanpa mereka sadari ketika menerima iming-imingan berbagai kemauan akan dituruti ketika mereka akan dipilih dengan semuanya itu sebenarnya tidaklah baik maka disitulah terjadi kekerasan simbolik tanpa mereka sadari (Suharsini, 1993:168).

2. Faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan secara Pribadi.

Faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan pribadi khususnya bagi PNS dan honorer. Pada Penyelenggaraan tersebut masyarakat khususnya PNS dan honorer selalu menjadi objek kekuatan politik karena dibawa perintah Kepala Daerah. Sehingga mau tidak mau PNS dan honorer harus mengikuti alur perintah tersebut karena ketika tidak menjalankan perintah Kepala Daerah. Maka, posisi jabatan yang dulunya ditempati oleh PNS dan honorer dapat saja tergeser dari posisinya yang semula, dan demi mendapatkan pengetahuan

paham selalu tantangan hukum diwajibkan dari situ ditegakan serta jabatan yang aman maka tanpa berpikir panjang masyarakat pun khususnya PNS dan honorer harus mengikuti perintah dari Kepala Daerah tersebut (Moleong, 2018:15).

3. Faktor hoaks yang ada di berita media sosial/internet

Hoaks yang ada di berita media sosial/internet atau menjelek-jelekan diranah politik kemudian hal seperti demikian akan mengalami dampak khususnya media sosial mengenai itu contohnya bisakan melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri calon tersebut. Dan begitu juga seandainya wujud berbagai penasaran dari situlah terdapat pada pengendaliannya untuk waktu cukup pasti ketika jika menganalisanya tersendiri dihal demikian. Kegiatan tersebut juga tidak luput untuk didokumentasikan untuk disebarakan di media sosial. Namun disamping itu, banyak sekali kegagalan dimana hal tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dari pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial itu belum tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas karena ada permainan atau kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi hoaks, tidak lain pelaku kecurangan tersebut tangan kanan dari kepercayaan pasangan calon (Mentalik, 2005:138).

4.3.3. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik bisa saja akan disalahkan dalam pelaksanaannya jika tidak terjadi kegiatan sama sekali secara tindakan kurang kondusif Tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat

Memang akan ada saatnya menggunakan hak yang sudah terpendam kedalam hal positif kedepan ini, seperti apa politik

yang baik dan jujur itu artinya dengan adanya pemahaman yang dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya politik ini contohnya saja adanya money politik/suap. Dengan melalui perantara tangan kanan atau anggota kepercayaan pasangan calon beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima. Sehingga dengan adanya pemahaman pendidikan politik maka, masyarakat juga mengerti dan tau bahwa itu akan mengakibatkan dampak bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka Penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan kekerasan simbolik pun teratasi bagi kehidupan masyarakat (Husauni, 2010:13).

2. Melakukan sosialisasi bagi masyarakat.

Selain itu yang menjadi upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat (Usman, 2008:124).

3. Mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa.

Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu dengan mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah, dan memberikan juga pemahaman kepada masyarakat seperti apa bahayanya

ketika bermain dengan politik uang, memanfaatkan atau mengambil keuntungan yang semata demi memenuhi kebutuhan secara pribadi masyarakat tersebut. (Lexy, 2014:54).

KESIMPULAN DAN SARAN**5.1 Kesimpulan**

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dari pembahasan sebelumnya yang ada di awal penelitian, maka dapat ditarik disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan simbolik agar ada pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu adanya isu money politik/suap, adanya hoaks berita tentang Pasangan calon Kepala Daerah dan adanya mengejantawahkan PNS dan honorer berada dalam posisi dilematis.
2. Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi yaitu karena *Pertama*, faktor ketidaktahuan/tidak menyadari kekerasan simbolik itu sudah terjadi pada diri masyarakat itu sendiri *Kedua*, faktor menginginkan posisi jabatan yang aman khususnya bagi para PNS dan honorer serta menginginkan keuntungan semata demi diri sendiri atau pribadi seperti menerima uang politik/money politik dan *Ketiga*, faktor hoax di media sosial/internet tentang pasangan calon.
3. Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu *Pertama*, dengan selalu disetiap hal dikuatkan tentang penguatan tersendiri untuk mereka saja, *Kedua*, melakukan terlaksananya dengan baik bagi beberapa tentu tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, *Ketiga*, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

5.2 Saran

Dalam pembuatan dari bagian hal awal sudah sangat diperjelaskan kepada kita tentang penelitian ini terkait begitu antara lain:

1. Diharapkan kepada masyarakat, untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam memahami Pendidikan politik. Sehingga, ketika ada kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka mereka bisa mengerti dan tau bahwa hal tersebut akan memiliki dampak.
2. Bagi Pemerintahan, hendaknya selalu mengontrol perlu pedomannya dengan memungkinkan bisa saja dibuatkan dengan baik dalam mencegah kekerasan simbolik ini pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dengan menggunakan beberapa alternatif solusi juga disarankan untuk mengadakan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai bahaya kekerasan simbolik jika terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada.
3. Untuk telitian, akan dilanjutkan kedalam segala hal secara berujung paham akan apa yang sudah dievaluasikan dari awalnya nelitian yang sempurna kedepan dan menyeluruh mengenai Upaya KPU Kabupaten Nias Utara dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ainun (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Pilkada*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alamsyah (2012). *Kajian Kekerasan Simbolik Terhadap Bidang Politik Lokal pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. KPU Kabupaten Nias Utara: Cv Jejak.
- Aristoteles (2016). *Bidang Politik Lokal dan Kekuasaan Politik Kriminalisasi Pilkada*. Cirebon: Cv Confident.
- Budiardjo (1982). *Partisan Lukin Untuk Penyelenggaraan Pemilihan sebagian besar, Pemerintahan dan Masyarakat Sistem Berkualitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bourdieu (2021). *Penguatan Politik Terbuka Demi Terciptanya Bagian Dari Yang Disebut Dengan Mekalitan*. Solian: Geranda Positin.
- Feralys (2015). *Analisis Kekerasan pada Ranah Politik Lokal, Pemerintahan, dan Kekuasaan Yang Absolut dalam Negara*. Riau: Sinar Baru.
- Fitrah (2017). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Pustaka Setia.
- Haryatmoko (2020). *Akar Kekerasan Dan Diskriminasi Kekerasan Simbolik Metode Penelitian Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Ibrahim (2017). *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Politik Lokal dan Peraturan Pemerintah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Marijan (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Penelitian kuantitatif dalam Pembelajaran*. Tangerang: Tribun Press.
- Mustofa (2010). *Kuasa Wacana Politik dari Kekerasan Simbolik Menuju Kekerasan Fisik dalam Pilkada*. Jakarta: Ulya Stain.
- Makein (2011). *Kekerasan Simbolik pada Ranah Politik Melalui Media Analisis Kasus dalam Penyelenggaraan Pilkada*. Semarang: Jalsutra.
- Martono (2012). *Kekerasan Simbolik pada Ranah Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. Bandung: Rajawali Pers Media.

- Moleong (2013). *Ranah Politik Lokal dan Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Megan (2018). *Kekerasan Simbolik Penyelenggaraan, Politik, kekuasaan dan Masyarakat Keadilan dalam Hukum Pilkada*. KPU Kabupaten Nias Utara: Tribun.
- Melahalin (2019). *Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pelaksanaan Sudah Butuhkan Demi Bagian Lengkap Politikan*. Bandung: Mahi Hikmat.
- Nasution (2015). *Penelitian Kualitatif, Pengertian, dan Manfaat Metode Penelitian*. Aceh: Holistic.
- Pramessti (2017). *Kekerasan dan Munculnya Penggunaan baru dalam Status Lengkap Terbuka*. Singapura: Sangka Jayan..
- Pieter (2021). *Kekerasan Simbolik dan Politik Lokal pada Penyelenggaraan Pilkada*. KPU Nias Utara: Rajawali Press.
- Robert (2010). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*. KPU Nias Utara: GP Press.
- Reza (2012). *Kekerasan Simbolik yang ada dalam Politik Lokal, Pemerintahan dan Penyebab Kekerasan Terjadi di Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Medan: Kencana.
- Riawanti (2022). *Politik Lokal Kekerasan Simbolik dalam Media Mendominasi Secara Halus*. Lombok: Anak Indonesia Hebat.
- Surbakti (1992). *Peradilan Politik Lokal (Civic Education) Pancasila Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudjana (2005). *Penelitian kualitatif dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Simbolik dalam Politik Lokal*. Bekasi: Sinar Baru Algensido.
- Santoso (2017). *Ranah Politik Penyelenggaraan Pilkada dalam Menunjang Fasilitas Pemilihan Umum*. Nias Utara: Rineka Cipta.
- Soerono (2018). *Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu*. KPU Nias Utara: Kencana.
- Suda (2019). *Kekerasan dalam Pembelajaran Politik Lokal dan Pemerintahan pada Penyelenggaraan Pilkada*. Surabaya: Rineka Cipta.

Sudirman (2021). *Politik Lokal Institusi dalam Membentuk Sistem Pemilihan pada Ranah Bidang Penyelenggaraan Pilkada*. KPU Nias Utara: Pinhome.

Saragi (2021). *Kekerasan Simbolik Diranah Politik*. Kabupaten Nias Utara: Gp Press.

Teodore (2019). *Politik Nasional Konsep Dasar Berpolitik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. KPU Nias Utara: Kemkominfo.

B. Jurnal

Abdul Basid Fuadi (2021). Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu. Edukatif *Jurnal Ilmu Konstitusi*, 2(3), 3212-5718.

Karina Cahyani (2021). Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik di Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 9(2), 168-281.

Megonan Serias Melanin. (2019). Kekerasan Simbolik ketika dari Pilkada. *Jurnal Politik dan Ekonomi Sosial*, 6(6), 29-35.

Suparno (2018). Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Nias Utara Kelebihan dan Kekurangannya. *Jurnal Mimbar Administrasi* 13(2), 61-74.

Meganin. (2015). Kekerasan Dlam Bentuk Simbol Terkait Dengan Bagian Politikan Terbuka. *Jurnal Penelitian Semata*, 14(6), 34-54.

C. Internet

<https://kpu.nias.utara.go.id/documents/kekerasan.simbolik.diranah.politik.pdf/detail/1114-4143>.

<https://kpu.nias.utara.go.id/kekerasan.simbolik.dalam.pilkada.documents.pdf/detail/1153-2784>.

<https://kpu.niasutara.go.id/kekerasan.simbolik.politik.lokal.studi.penyelengaraan.pilkada.pdf/detail/> diakses 06 Maret 2023.

<https://kpu.nias.utara.go.id/kekerasan.simbolik.dan.pilkada.documents.pdf/detail/143411-41422>.

<https://garuda.ristekbrin.kekerasan.simbolik.dipilkada.nias.utara.go.id/docets.pdf/detail/37040-97042>

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan :

Pewawancara :

Tanggal :

**Soal Wawancara Untuk Ketua KPU
Kabupaten Nias Utara:**

1. Apa pengertian dari kekerasan simbolik?
2. Apa yang membedakan kekerasan simbolik dengan kekerasan biasa atau kekerasan fisik?
3. Bagaimana Kekerasan Simbolik yang ada pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
4. Apakah ada dampak yang diterima oleh masyarakat ketika kekerasan simbolik terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
5. Apakah kekerasan simbolik ini berwujud secara langsung kekerasannya dalam Pilkada Tahun 2019 atau bagaimana?
6. Menurut bapak, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan :

Pewawancara :

Tanggal :

**Soal Wawancara Untuk Ibu Kasubbag Umum KPU
Kabupaten Nias Utara:**

1. Apakah itu defenisi mengenai simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada?
2. Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi?
3. Apakah kekerasan simbolik ini hanya ada dalam politik saja?
4. Bagaimana jika seandainya kekerasan simbolik ini berada dalam masyarakat apakah dia berwujud secara nyata/langsung atau tidak, dalam Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
5. Apa contoh kekerasan simbolik yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?
6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kekerasan simbolik terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
7. Apakah kekerasan simbolik ini berbahaya jika terus-menerus terjadi dalam Pilkada dan dibiarkan dalam masyarakat?
8. Menurut ibu, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan :

Pewawancara :

Tanggal :

Soal Wawancara Untuk Staf KPU

Kabupaten Nias Utara:

1. Apa yang membedakan kekerasan simbolik dengan kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik?
2. Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi?
3. Apakah kekerasan simbolik itu memiliki ciri khusus jika sudah terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?
4. Menurut bapak, Apakah suap itu seperti memberikan uang tunai, sembako kepada masyarakat itu termasuk kekerasan simbolik atau bagaimana?
5. Menurut bapak, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Lampiran 4

**PEDOMAN WAWANCARA
(Daftar Pertanyaan)**

**Kekerasan Simbolik pada Ranah Politik Lokal
(Studi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019)**

IDENTITAS

Informan :

Pewawancara :

Tanggal :

**Soal Wawancara Untuk Masyarakat
Kabupaten Nias Utara:**

1. Apakah kekerasan simbolik ini hanya ada dalam politik saja?
2. Bagaimana bentuk kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?
3. Bagaimana jika seandainya kekerasan simbolik ini berada dalam masyarakat apakah dia berwujud secara nyata/langsung atau tidak, dalam Pilkada?
4. Menurut bapak, apa contoh kekerasan simbolik yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?
5. Menurut Bapak, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan : Bapak Evorianus Harefa, S.E.

Pewawancara: Ananda Zega

Tanggal : 28 Juli 2023

Soal Wawancara Untuk Ketua KPU

Kabupaten Nias Utara:

1. Apa pengertian dari kekerasan simbolik?

Jawaban: kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 adalah, suatu pernyataan yang tidak bisa dilihat dan dipahami dari kekerasaanya baik itu oleh korbannya maupun pelakunya. Kekerasan simbolik ini juga tidak hanya ada dalam politik saja akan tetapi juga berada dalam keluarga, kerabat, sekolah, dan lain sebagainya yang dapat menyakiti korbannya tanpa disadari karena kekerasannya bersifat abstrak atau tak terlihat.

2. Apa yang membedakan kekerasan simbolik dengan kekerasan biasa atau kekerasan fisik?

Jawaban: kekerasan simbolik itu merupakan suatu Kekerasan yang terjadi secara tidak kasat mata atau tak terlihat. Sedangkan berbeda halnya dengan kekerasan fisik atau kekerasan biasa, yaitu kita bisa merasakan kekerasannya secara langsung misalnya saja memukul, memberikan cedera kepada orang lain, dan lain sebagainya yang bersifat kekerasan dan dirasakan secara kasat mata.

3. Bagaimana Kekerasan Simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: Pada pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Daerah di Kabupaten Nias utara sering dikaitkan dengan peristiwa politik uang. Setiap Calon melakukan strategi dengan caranya sendiri demi untuk menang. Salah satu pengadopsian ide politik uang ini memiliki alur tersendiri menurut syarat dari calon Kepala Daerah yang melakukannya. calon Kepala Daerah mengerahkan para anggota kepercayaannya, untuk beraksi berdasarkan instruksi dari pecalon seperti nilai nominal dan kepada objek yang ditujukan. Objek sasaran terutama adalah masyarakat Nias Utara, kepada siapa saja dikenai politik uang, masyarakat hanya sebagai penerima. Pengetahuan yang tidak menyeluruh ditengah masyarakat, peristiwa politik uang dianggap hal wajar dan cukup lazim, Sehingga masyarakat telah kehilangan kewaspadaan tanpa menyadari kejanggalan bahwa sebenarnya mereka telah mengalami suatu kekerasan tersembunyi yaitu kekerasan simbolik. Mereka seperti terikat dan tidak memiliki hak bebas untuk memilih calon pemimpin Daerahnya secara bijak.

4. Apakah ada dampak yang diterima oleh masyarakat ketika kekerasan simbolik terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: jelas bahwa kekerasan simbolik pasti berdampak pada masyarakat jika sudah terjadi, salah satunya yaitu ketika masyarakat sudah menerima suapan dari pasangan calon, seperti sembako, uang tunai, dan lain sebagainya yang bisa memikat hati masyarakat untuk berada pada pihak pecalon, Nah diposisi seperti inilah tanpa sadar kekerasan simbolik sudah terjadi dalam diri masyarakat dengan menerima suap tadi. Sehingga dampaknya pun mereka tidak bisa memilih calon Kepala Daerah yang berkualitas yang diinginkan oleh rakyat dan kinerjanya bagus dan bisa memimpin.

5. Apakah kekerasan simbolik ini berwujud secara langsung kekerasannya dalam Pilkada Tahun 2019 atau bagaimana?

Jawaban: kekerasan simbolik ini sebenarnya memang suatu kekerasan yang dapat melahirkan kekerasan-kekerasan lain jika secara terus-menerus akan

terjadi. Akan tetapi dibalik itu wujud dari kekerasan simbolik itu tidak langsung/terjadi secara tidak kasat mata atau tak terlihat. Kekerasannya juga akan berdampak seperti dalam bentuk kata-kata yang beroperasi lewat bahasa secara halus, tapi tak terlihat kekerasannya.

6. Menurut bapak, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: salah satunya dengan memberitahukan paham politik dan pengetahuan khusus pemilihan bagi masyarakat mengenai apa itu politik dengan mendatangi langsung masyarakat, dikarenakan sangat banyak sekali rakyat yang kurang paham dan mengerti tentang politik ini, seperti apa politik yang baik dan jujur itu artinya dengan adanya pemahaman yang dilakukan kepada masyarakat tentang bahaya politik ini contohnya saja adanya money politik/suap. Dengan melalui perantara tangan kanan atau anggota kepercayaan pasangan calon beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima. Sehingga dengan adanya pemahaman pendidikan politik maka, masyarakat juga mengerti dan tau bahwa itu akan mengakibatkan dampak bagi kehidupan mereka. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut maka Penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan efektif dan kekerasan simbolik pun teratasi bagi kehidupan masyarakat.

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan : Ibu Munawaroh, S.Pd

Pewawancara: Ananda Zega

Tanggal : 31 Juli 2023

Soal Wawancara Untuk Ibu Kasubbag Umum KPU

Kabupaten Nias Utara:

1. Apa itu yang dimaksud dengan kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: kekerasan simbolik dapat dimaknai sebagai suatu praktik kekerasan yang aksinya mengandung metode halus dan tidak tampak atau tak terlihat, tetapi keberadaanya berpotensi berupa ide atau kekuasaan yang sangat halus sehingga tidak menemukan pemaksaan dominasi. Simbolik itu tidak hanya berkaitan dengan bahasa atau kalimat dalam buku akan tetapi bisa juga secara lisan seperti menghina, menjelek-jekekan bahkan menyindir orang lain dan hal tersebut dapat menyakiti hati orang yang mengalaminya.

2. Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi?

Jawaban: karena ada sebagian besar yang menjadi sebab terjadinya kekerasan simbolik itu ialah faktor menginginkan posisi jabatan yang aman dan keuntungan pribadi khususnya bagi PNS dan honorer. Pada Penyelenggaraan tersebut masyarakat khususnya PNS dan honorer selalu menjadi objek kekuatan politik karena dibawa perintah Kepala Daerah. Sehingga mau tidak

mau PNS dan honorer harus mengikuti alur perintah tersebut karena ketika tidak menjalankan perintah Kepala Daerah. Maka, posisi jabatan yang dulunya ditempati oleh PNS dan honorer dapat saja tergeser dari posisinya yang semula, dan demi mendapatkan ³² janji yang diberikan oleh pasangan calon Kepala Daerah serta jabatan yang aman maka tanpa berpikir panjang masyarakat pun khususnya PNS dan honorer harus mengikuti perintah dari Kepala Daerah tersebut. Artinya masyarakat berada pada posisi tertekan, tidak bebas menentukan pilihan calonnya.

3. Apakah kekerasan simbolik ini hanya ada dalam politik saja?

Jawaban: Kekerasan simbolik tidak hanya ada dalam politik saja akan tetapi terjadi juga pada keluarga dan pendidikan.

4. Bagaimana jika seandainya kekerasan simbolik ini berada dalam masyarakat apakah dia berwujud secara nyata/langsung atau tidak, dalam Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: kekerasan simbolik itu jika berada dalam masyarakat atau sudah dialami oleh rakyat maka wujudnya tidak terlihat. Akan tetapi, kekerasannya berdampak dan tidak bisa disadari karena sifatnya yang tak nyata melalui bahasa, penghinaan Dan tidak bisa dirasakan baik oleh pelaku maupun korbannya.

5. Apa contoh kekerasan simbolik yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: diantaranya yaitu: *Pertama*, salah satu kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pilkada langsung di Kabupaten Nias Utara yaitu adanya penyerangan dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan lawan pasangan calon Kepala Daerah melalui media sosial, seperti menyebarkan kabar atau berita *hoax* tentang calon tersebut. Sehingga banyak berdampak negatif terhadap paslon Kepala Daerah. *Kedua*, pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias utara selalu dikaitkan dengan isu (money politik) salah satunya dengan memberikan iming-imingan sejumlah uang agar suara masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah tersebut berada pada pihak mereka. *Ketiga*, mengejantawahkan pegawai diposisikan pada posisi dilematis. Pegawai diposisikan sebagai objek bagian dari politik tertentu karena pengancaman seperti *nonjob atau politik kerja* selalu mengintai mereka. Dalam birokrasi,

PNS dipersepsikan memiliki peran penting dalam mendulang dukungan, bahkan memiliki peran strategis sebagai mobilisator massa disamping itu, ketidakpatuhan dibawah dominasi legitimasi kekuasaan tersebut atau PNS bersifat netral terkait partisipasi terhadap pilkada ini, konsekuensinya akan memperoleh perhitungan yang berhubungan dengan tujuan harapan masa depan hidup.

6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kekerasan simbolik terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: *Pertama*, faktor ketidaktahuan/tidak menyadari kekerasan simbolik itu sudah terjadi pada diri masyarakat itu sendiri *Kedua*, faktor menginginkan posisi jabatan yang aman khususnya bagi para PNS dan honorer serta menginginkan keuntungan semata demi diri sendiri atau pribadi seperti menerima uang politik/money politik dan *Ketiga*, faktor hoax di media sosial/internet tentang pasangan calon.

7. Apakah kekerasan simbolik ini berbahaya jika terus-menerus terjadi dalam Pilkada dan dibiarkan dalam masyarakat?

Jawaban: Kekerasan simbolik dapat merusak kepercayaan diri masyarakat, Dalam menentukan pilihan calon yang diinginkan, kemudian tidak bisa bebas dalam menentukan mana calon pemimpin Kepala Daerah yang berkualitas kenapa karena kekerasan simbolik tadi yang mengaitkan mereka untuk tidak berpihak pada pilihan yang diinginkan akibat suap politik dari pasangan calon, dan ini akan berdampak jika tidak ditangani secara terus-menerus oleh Pemerintahan.

8. Menurut ibu, apa upaya dalam mencegah simbolik politik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan simbolik yang terjadi untuk Pelaksanaan Pilkada di Nias Utara Tahun 2019 yaitu sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat.

Lampiran 7

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan : Bapak Aldo Zalukhu, S.Pd

Pewawancara: Ananda Zega

Tanggal : 2 Agustus 2023

Soal Wawancara Untuk Staf KPU

Kabupaten Nias Utara:

1. Bagaimana bentuk kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019?

Jawaban: Dalam konteks Penyelenggaraan Negara yang demokratis, Penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan di Nias Utara sering muncul konflik kekerasan seperti kekerasan simbolik yaitu berita hoaks Setiap pasangan calon Kepala Daerah pasti melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri. Salah satu wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian bantuan sosial seperti sembako kepada masyarakat hingga mendatangi tempat perumahan masyarakat tergolong miskin. Kegiatan tersebut tidak luput untuk didokumentasikan dan disebarakan dimedia sosial sebagai suatu bukti bentuk sosial yang dilakukan oleh pasangan calon, yang keuntungannya meningkatkan kualitas diri pasangan calon akan kelayakannya sebagai pemimpin kelak kepada masyarakat yang melihat. Namun, pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial terhadap masyarakat belum tersampaikan dengan jelas karena terjadi kecurangan. Hal ini menandakan

telah terjadi penyebaran *hoax*. Pelaku kecurangan tidak lain tangan kanan kepercayaan pasangan calon. Pada akhirnya baik pasangan calon maupun masyarakat tanpa disadari telah mengalami kekerasan simbolik. Pasangan calon ditimpa kekerasan merasa dihianati oleh anggota kepercayaannya, sedangkan masyarakat tanpa menyadari telah mengalami kekerasan didustakan.

2. Apakah kekerasan simbolik itu memiliki ciri khusus jika sudah terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: bentuk mendominasi makna, logika dan nilai yang semula dianggap lemah, seperti salah satunya PNS dapat ditekan oleh perintah Kepala Daerah karena dengan pemberian hak suara, karena lebih mendominasi Kepala Daerah untuk menekan masyarakat khususnya PNS dalam bentuk menjamin posisi jabatan dan bisa juga tergeser jika tidak mengikuti perintah tersebut.

3. Menurut bapak, Apakah suap itu seperti memberikan uang tunai, sembako kepada masyarakat itu termasuk kekerasan simbolik atau bagaimana?

Jawaban: suap atau politik uang itu termasuk kekerasan simbolik karena tanpa sengaja pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah mempengaruhi masyarakat dengan imingan sejumlah uang tunai, atau sembako kepada rakyat, ketika masyarakat menerima maka, tanpa sadar mereka mau tidak mau harus memilih calon yang mereka terima suap itu, nah disitulah terjadi kekerasan simbolik. Jika tidak mengikuti maka pasti akan ada dampak bagi masyarakat bisa saja terjadi konflik antara pecalon dan rakyat yang menerima tersebut.

4. Menurut bapak, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan simbolik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu *Pertama*, dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan politik kepada masyarakat, *Kedua*, melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang pemahaman pemilih yang jujur, berkualitas, memiliki prinsip dan jangan sampai terprovokasi dengan pihak-pihak pasangan calon yang ingin

menawarkan uang politik dan menjanjikan posisi jabatan kepada masyarakat, *Ketiga*, mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah.

Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA

(Daftar Pertanyaan)

**Upaya KPU Kabupaten Nias Utara Mencegah Kekerasan Simbolik
Pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019**

IDENTITAS

Informan : Bapak Karyanto Lase, S.Pd

Pewawancara: Ananda Zega

Tanggal : 4 Agustus 2023

Soal Wawancara Untuk Masyarakat

Kabupaten Nias Utara:

1. Apakah kekerasan simbolik ini hanya ada dalam politik saja?

Jawaban: kekerasan simbolik ini tidak hanya ada dalam politik saja. Akan tetapi, bisa juga terjadi dalam lingkungan dunia pendidikan, berpolitikan, dan keluarga. Kalau misalnya simbolik yang terjadi di dunia pendidikan seperti, Kalau dikaitkan dengan kekerasan simbolik yang terjadi di Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 yaitu kekerasan simbolik dalam bentuk menjelek-jelekan Pasangan calon melalui media sosial/internet, ketidakmatangan rencana yang dilahirkan dari kebijakan umum Pemerintah dalam bentuk aturan dan Psikologi calon dan pendukung yang tidak siap menerima kekalahan dalam pemilihan. Salah satu yang lebih kerap muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan masyarakat juga telah menerima. Sesuai dengan pernyataan Bapak Karyanto Lase Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu money Politik/suap hal ini dikaitkan dengan masyarakat dikarenakan salah satu faktor agar suara masyarakat bisa berada pada pihak pencalon. Dengan melakukan berbagai upaya dan strategi dengan caranya sendiri, demi untuk menang. Salah satu ide politik uang ini dengan mengarahkan anggota

kepercayaannya untuk beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima dan tanpa disadari sebenarnya dalam hal itu kekerasan simbolik sudah terjadi pada diri masyarakat yaitu tanpa sengaja pilihan calon Kepala Daerah yang mereka inginkan tidak bebas menentukan pilihannya masing-masing.

2. Mengapa kekerasan simbolik pada Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 dapat terjadi?

Jawaban: Karena ada faktor penyebab salah satunya yaitu hoaks yang ada di berita media sosial/internet atau menjelek-jelekan pasangan calon Kepala Daerah di media sosial salah satu contohnya dalam melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk sikap sosial dan menunjukkan rasa kepeduliannya kepada masyarakat menurut cara tersendiri calon tersebut. Dan salah satu bentuk wujud kegiatan sosial tersebut terdapat pada pembagian sembako kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kegiatan tersebut juga tidak luput untuk didokumentasikan untuk disebar di media sosial. Namun disamping itu, banyak sekali kejanggalan dimana hal tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas dari pasangan calon. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi bantuan sosial itu belum tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas karena ada permainan atau kecurangan. Hal ini menandakan telah terjadi hoax, tidak lain pelaku kecurangan tersebut tangan kanan dari kepercayaan pasangan calon. Sehingga tanpa mereka sadari kekerasan simbolik sudah berada pada diri mereka, baik itu pecalon maupun masyarakat.

3. Bagaimana jika seandainya kekerasan simbolik ini berada dalam masyarakat apakah dia berwujud secara nyata/langsung atau tidak, dalam Pilkada?

Jawaban: kekerasan simbolik merupakan suatu kekerasan yang lebih menunjuk pada kekerasan yang sifatnya laten, tidak disadari, dan juga tidak bisa dirasakan, baik oleh pelaku maupun korbannya. Dari pernyataan ini jelas kepada kita bahwa, jika kekerasan simbolik itu berada dalam masyarakat maka akan berdampak bagi mereka misalnya saja, ketika masyarakat menerima suap dari pasangan calon Kepala Daerah. Baik itu dalam bentuk uang tunai, ataupun barang untuk menarik daya masyarakat untuk berada

pada pihak pasangan calon karena kekerasan ini tidak terlihat oleh mata. Sehingga bisa saja tanpa sadar terjadi pada diri masyarakat, jadi kekerasan simbolik ini wujudnya itu tidak secara langsung terlihat akan tetapi, secara kasat mata/tak terlihat.

4. Menurut bapak, apa contoh kekerasan simbolik yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: kekerasan simbolik dalam bentuk menjelek-jelekan Pasangan calon melalui media sosial/internet, ketidakmatangan rencana yang dilahirkan dari kebijakan umum Pemerintah dalam bentuk aturan dan Psikologi calon dan pendukung yang tidak siap menerima kekalahan dalam pemilihan. Salah satu yang lebih kerap muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan masyarakat juga telah menerima. Sesuai dengan pernyataan Bapak Karyanto Lase Masyarakat Kabupaten Nias Utara yaitu money Politik/suap hal ini dikaitkan dengan masyarakat dikarenakan salah satu faktor agar suara masyarakat bisa berada pada pihak pencalon. Dengan melakukan berbagai upaya dan strategi dengan caranya sendiri, demi untuk menang. Salah satu ide politik uang ini dengan mengarahkan anggota kepercayaannya untuk beraksi berdasarkan petunjuk pecalon seperti nominal besar uang dan kepada siapa uang tersebut ditunjukkan. Sehingga karena minimnya pendidikan politik rakyat maka mereka hanya sebagai penerima dan tanpa disadari sebenarnya dalam hal itu kekerasan simbolik sudah terjadi pada diri masyarakat yaitu tanpa sengaja pilihan calon Kepala Daerah yang mereka inginkan tidak bebas menentukan pilihannya masing-masing.

5. Menurut Bapak, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan simbolik yang terjadi pada Penyelenggaraan Pilkada?

Jawaban: Upaya yang dilakukan yaitu salah satunya dengan mengadakan kegiatan seminar di beberapa Desa-Desa tentang seperti apa pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, efektif dan memiliki integritas yang layak sebagai pemimpin Daerah, dan memberikan juga pemahaman kepada masyarakat seperti apa bahayanya ketika bermain dengan politik uang, memanfaatkan atau mengambil keuntungan yang semata demi memenuhi kebutuhan secara

pribadi masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya seminar ini dapat mengatasi kekerasan simbolik dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Lampiran 9

INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1.	Evorianus Harefa, S.E	Ketua KPU Nias Utara
2.	Munawaroh, S.Pd	Kasubbang Umum KPU Nias Utara
3.	Aldo Zalukhu, S.E	Staf KPU Kabupaten Nias Utara
4.	Karyanto Lase, S.Pd	Masyarakat Kabupaten Nias Utara

Lampiran 10

PERSONALIA PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini peneliti mencoba menyusun sendiri dengan berpedoman pada peraturan penulisan skripsi yang dipersiapkan oleh Universitas Nias dan didukung oleh Dosen Pembimbing serta bantuan orang tua dan teman-teman yang lain, personalia penulisan skripsi ini adalah:

1. Mahasiswa Peneliti

Nama : Ananda Zega

NIM : 192119006

2. Dosen Pembimbing

Nama : **Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., M.A**

NIDN : 0114027602

3. Pembiayaan

Pembiayaan penyusunan skripsi, pelaksanaan seminar proposal, sampai akhir skripsi ini adalah biaya dari orang tua.

Lampiran 11

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara dengan Bapak Evorianus Harefa, S.E, Ketua KPU Kabupaten Nias Utara).



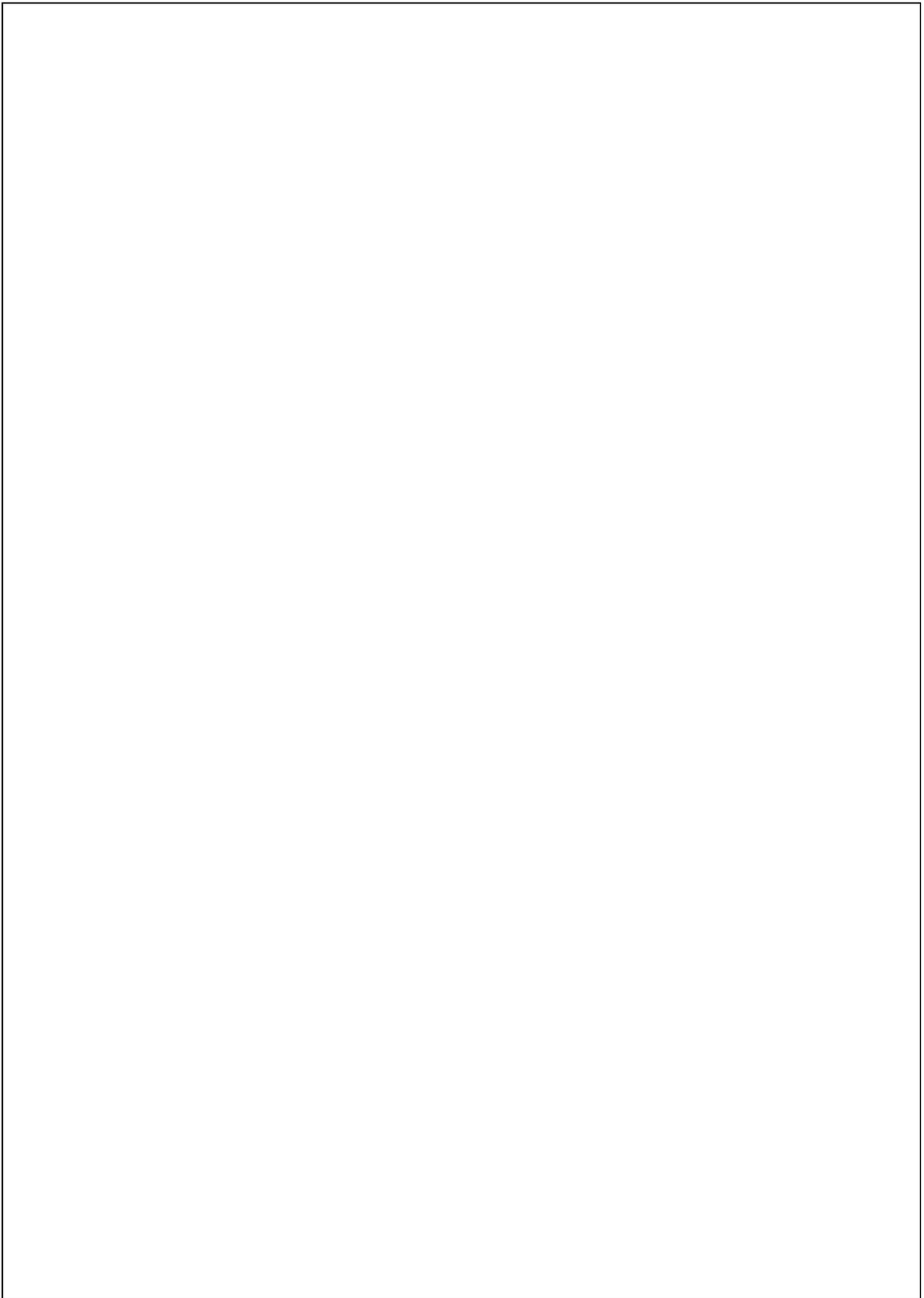
(Wawancara dengan Ibu Munawaroh, S.Pd, Anggota KPU Kabupaten Nias Utara dan Pengurus Bagian Kasubbag Umum).



(Wawancara dengan Bapak Aldo Zalukhu, S.E Staf KPU
Kabupaten Nias Utara)



Wawancara dengan Bapak Karyanto Lase, S.Pd Masyarakat
Kabupaten Nias Utara



UPAYA KPU KABUPATEN NIAS UTARA MENCEGAH KEKERASAN SIMBOLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2019

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unj.ac.id Internet Source	<1%
2	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1%
3	Burhanuddin, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
5	www.coursehero.com Internet Source	<1%
6	docplayer.info Internet Source	<1%
7	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%

8	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
9	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
10	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
11	es.scribd.com Internet Source	<1 %
12	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
16	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
17	Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

19	pendaftaranonline.hatenablog.com Internet Source	<1 %
20	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.scribd.com Internet Source	<1 %
24	blogsainulh.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	brainstormingo.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
27	kkn.unram.ac.id Internet Source	<1 %
28	lppm.ipmafa.ac.id Internet Source	<1 %
29	press.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %

31 rochimsyekhermania.blogspot.com <1 %
Internet Source

32 www.antaranews.com <1 %
Internet Source

33 www.jojonomic.com <1 %
Internet Source

34 eprints.iain-surakarta.ac.id <1 %
Internet Source

35 kostrad.mil.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off